



MINGGU II OKTOBER 2023

• TABLOID

REFERENSI PEMILU 2024 •

# info indonesia

Harga @ Rp 20.000,-



Road to  
Election  
2024

## CAK IMIN BIKIN SIAL ANIES

**PRABOWO  
MATI KUTU  
PILIH  
CAWAPRES**

**GANJAR  
AMANKAN  
SUARA NU**

**KPU TETAP  
BERI KARPET  
MERAH NAPI  
KORUPTOR**

**VISI DAN  
SOLUSI  
TOKOH BARU  
UNTUK NTB**

**NASDEM  
DIGUNCANG  
ISU  
KORUPSI**

**YENNY  
NOMOR  
WAHID  
KHOFIFAH  
LEBIH  
DIPILIH**



**GANTIKAN MEGAWATI  
JADI KETUA UMUM PDIP,  
JOKOWI LAWAN TRAH  
SOEKARNO**





## Cari Aman

Penetapan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka oleh KPK memang mengejutkan sebagian orang, meski ada yang telah menduga sebelumnya.

Menteri yang berasal dari Partai Nasdem ini menjadi orang kedua yang jadi tersangka setelah Johnny G Plate yang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika.

Penetapan tersangka menjelang Pilpres ini tentu secara politik cukup mengganggu, khususnya dari Koalisi Perubahan yang diusung Partai Nasdem, PKS dan PKB. Bahkan, sebelumnya Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, juga sempat dipanggil KPK untuk dimintai keterangan terkait korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan pada 2012.

Apapun alasannya, tentu hal ini sangat kental dengan nuansa politis daripada penegakkan hukum itu sendiri. Beberapa elit politik lainnya sebetulnya juga sempat tersandung hukum, namun secara perlahan terlihat meng- hilang.

Sandungan kasus korupsi dari dua menteri Partai Nasdem ini tentu secara tidak langsung akan memperburuk citra koalisi pengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Amin.

Persoalan yang merundung koalisi ini tidak habis sampai di sini. PKB juga kini mulai diguncang konflik internal yang seakan-akan ingin menggoyang kedudukan Cak Imin di kursi ketua umum.

Setelah Yenny Wahid, putri Gus Dur yang mengulang memori peristiwa kudeta memperebutkan kursi Ketua Umum PKB, kini giliran Menteri Agama yang juga Ketua DPP PKB, Yaqut Cholil Qoumas.

Secara terang-terangan, Yaqut menyindir Cak Imin yang lebih memilih bergabung di Koalisi Perubahan. Perse- teruan keluarga ini jelas menggerus kepercayaan masyarakat terhadap PKB yang diduga memang sudah didesain untuk dijatuhkan.

Posisi saling mengamankan juga terlihat pada kubu koalisi Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto yang hingga kini belum juga mengumumkan siapa bakal cawapres mereka.

Sekali lagi, suara Nahdlatul Ulama (NU) seperti kembali diperebutkan oleh Ganjar dan Prabowo untuk merebut simpati rakyat.

Dari kubu Ganjar Pranowo, dua tokoh NU yakni Khofifah Indar Parawansa dan Mahfud MD paling santer disebut sebagai bakal cawapres.

Sementara dari kubu Prabowo Subianto juga masih menimbang-nimbang apakah akan menggandeng Erick Thohir sebagai bakal cawapres. Nama lainnya adalah Yenny Wahid, putri kedua Gus Dur.

Persaingan perebutan dari tokoh-tokoh NU ini menjadi sajian utama kami di Tabloid Info Indonesia edisi kali ini.

Pada Info Partai, kami juga mengamati sepak terjang Presiden Joko Widodo yang semakin hari pengaruhnya semakin menguat. Sehingga bukan hal mustahil kalau trah Jokowi bakal menduduki kursi PDIP menggantikan Megawati Soekarnoputri dari trah Soekarno.

Sementara, ormas-ormas keagamaan juga masih menyatakan independensi di Pemilu 2024. Baik NU, Muham- madiyah maupun HMI menyatakan mereka masih menjaga kemurnian organisasi dengan tetap fokus pada kegi- atan organisasi daripada sibuk memberikan dukungan politik.

Di sisi lain, maraknya teknologi informasi membuat Pemilu 2024 ini tidak lepas dari perang media sosial, hoaks dan black campaign.

Kami juga menyoroti soal masih eksisnya para koruptor di dunia politik. Hal ini terlihat dari masih banyaknya para mantan-mantan narapidana korupsi yang terjun ke dunia politik, termasuk yang masih berstatus tersangka.

Ada banyak sajian menarik lainnya yang kami informasikan kepada pembaca di edisi ini. Selamat membaca!!!●







“Seperti saya sering katakan, Jawa Timur adalah kunci, karena tidak ada satu pun capres yang unggul di sana, semua butuh komplementer, semua butuh cawapres dari Jawa Timur”

Ali Rifan

# PRABOWO MATI KUTU PILIH CAWAPRES

**Sikap menggantung bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, yang tidak juga menentukan bakal calon wakil presiden untuk diboyong mengikuti Pilpres 2024, dianggap sebagian pihak sebagai sikap BM alias “banyak mau”. Sebab dari banyak tokoh yang bermunculan di publik dengan latar belakang berbeda, tak juga ada yang masuk karakteristik pilihan dia.**

Beberapa nama yang menguat dengan latar belakang berbeda, di antaranya Menteri BUMN, Erick Thohir, yang juga resmi menjadi anggota kehormatan Barisan Anshor Serbaguna (Banser); Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa; Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra; Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka.

Dari nama-nama elite politik yang disinyalir potensial mendongkrak suara Ketua Umum Partai Gerindra itu di Pilpres 2024, justru Koalisi Perubahan telah meram-pungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, untuk didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada 19 Oktober 2023. Yaitu mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang dipasangkan dengan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang menjabat Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar.

Keputusan Anies dan partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Perubahan antara lain Partai Nasdem, PKB, dan juga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengu-sung Cak Imin menjadi bakal cawapres, mengubah peta kemenangan Pilpres 2024 yakni sosok dari kalangan NU menjadi penentu kemenangan.

Dinamika politik Pilpres yang terjadi jelang pendaftaran Pilpres 2024 ini, dipan-

dang Direktur Arus Survei Indonesia, Ali Rifan, tidak berkaitan erat dengan sikap isu Prabowo yang menyebut tengah menunggu kesempatan meminang Gibran, karena terdapat gugatan batas usia minimum capres-cawapres di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat memuluskan pencalonan Wali Kota Solo itu, namun belum diputus.

Faktor utama yang membuat Prabowo bersikap pasif karena peta penentuan cawapres saat ini mengarah kepada tokoh-tokoh NU. Sementara, koalisi partai politik pendukung Prabowo terbilang gemuk dan memiliki tokoh-tokoh NU yang banyak, sehingga membuat bingung untuk mengakomodir.

“Bacaan saya per hari ini, klaster yang sangat dicari itu adalah klaster NU. Kenapa? Karena sudah pecah telur satu capres mengusung cawapres NU (yaitu Anies dengan Cak Imin). Dugaan saya yang lain juga akan mencari cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama. Karena kalau sampai hanya di satu p a - s l o n

cawapres NU, ini akan terjadi penggelembungan suara NU di satu capres-cawapres itu,” ujar Ali kepada Info Indonesia, Kamis, 5 Oktober 2023.

Pengaruh lain yang membuat Prabowo tak kunjung menentukan cawapres, menurut Ali, juga karena koalisi PDIP tak kunjung menentukan bakal cawapres pendamping Ganjar Pranowo. Meski begitu, juga telah muncul desas-desus sejumlah nama tokoh NU yang akan digaet seperti Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Ini semua, kalau saya perhatikan, antara Ganjar dan Prabowo itu wait and see, saling nunggu, saling melihat. Jadi memang yang paling diperebutkan itu adalah nama Khofifah. Kenapa Khofifah diperebutkan? Karena Khofifah adalah tokoh yang punya taktik politik kuat di Jawa Timur, dan semuanya memperebutkan Jawa Timur,” paparnya.

“Seperti saya sering katakan, Jawa Timur adalah kunci, karena tidak ada satu pun c a p r e s yang unggul di sana, semua butuh komplementer, semua butuh cawapres dari Jawa Timur,” sambung Ali.

Kandidat doktoral ilmu politik Universitas Indonesia itu juga memperkirakan, meskipun nantinya Gibran berpeluang dimajukan sebagai bakal cawapres Prabowo karena MK menerima gugatan norma batas usia minimum capres-cawapres menjadi 35 tahun, juga tidak memberikan dampak elektoral yang menguntungkan Prabowo.

“Terkait Gibran, menurut saya tidak otomatis kemudian kalau cawapresnya Gibran itu kompetitif. Misalnya, Prabowo dengan Gibran dan Ganjar dengan Khofifah, itu juga ngeri-ngeri sedap menurut saya. Karena kalau lihat posisi Prabowo, itu lemahnya di Jawa Timur. Prabowo itu kuncinya di Jawa Timur. Jawa Barat kuat, Jawa Tengah sudah kandang banteng, maka tinggal Jawa Timur yang harus direbut oleh Prabowo,” tuturnya.

Ditambah, Prabowo juga punya pengalaman tidak mengenakan di dua kali Pilpres sebelumnya, yaitu kalah dari Joko Widodo. Sehingga menurutnya, Menteri Pertahanan itu patut mempertimbangkan secara matang tentang siapa dan dari kalangan mana yang seharusnya dicomot menjadi bakal cawapres.

“Dua kali Pilpres, 2014 dan 2019 itu Prabowo kalah di Jawa Timur. Dan menurut saya, sekarang Prabowo harus menentukan pilihan siapa cawapres dari tokoh NU. Kalau enggak tokoh NU, paling tidak adalah tokoh yang punya irisan dengan NU,” katanya.

Kemudian, mengenai isu kolaborasi koalisi pendukung Prabowo dengan koalisi Ganjar diperkirakan hanya akan menjadi isapan jempol belaka. Karena dari segi elektabilitas dan peluang kemenangan, kedua tokoh itu punya persentase yang setara. Sehingga, dia menyarankan agar Prabowo tidak larut dengan isu kolaborasi itu yang dibalut dengan isu dua pasangan calon presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

“Kalau apakah antara Ganjar dan Prabowo itu berduet, itu kemungkinan kecil ya menurut saya, karena kedua-duanya punya kesempatan, punya potensi yang sama bisa memenangkan pertarungan Pilpres. Secara statistik kan sebenarnya antara Prabowo dan Ganjar sama, tidak ada yang unggul dominan antara kedua itu,” ungkap Ali.

“Kalau untuk berduet itu kecil kemungkinannya. Tapi, berduet yang besar kemungkinan antara dua capres itu. Jadi berduet, bukan berduet,” tutupnya. •RDO





“Cak Imin selama ini sudah melakukan roadshow kebangsaan ke berbagai daerah dan melakukan canvassing melalui baliho-baliho, namun nyatanya tidak bisa juga menaikkan elektabilitasnya”

*Hasyibulloh Mulyawan*



# CAK IMIN BIKIN SIAL ANIES

**Elektabilitas bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, anjlok pasca mendeklarasikan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, sebagai bakal calon wakil presiden di Pilpres 2024.**

**P**enurunan elektabilitas Anies Baswedan itu tercatat dalam hasil survei terbaru yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

“Anies elektabilitasnya justru turun pasca-deklarasi. Pasca-memilih Cak Imin sebagai cawapres justru elektabilitas Anies menurun,” kata Peneliti LSI Denny JA, Adjie Alfaraby.

Adjie menyampaikan, elektabilitas Anies Baswedan turun pasca deklarasi terjadi pada periode Agustus ke September 2023. Penurunan elektabilitas itu terhitung sangat besar yakni mencapai 5,2 persen.

Pada Agustus 2023, elektabilitas Anies Baswedan adalah sebesar 19,7 persen. Sedangkan, memasuki September 2023, elektabilitas mantan gubernur DKI Jakarta itu turun drastis menjadi 14,5 persen. Hal ini terjadi pasca Anies Baswedan mengumumkan Cak Imin sebagai cawapresnya di Pilpres 2024.

Tidak hanya itu, penurunan elektabilitas itu juga disebabkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang mengkritik keras Anies Baswedan karena secara sepihak mengumumkan Cak Imin sebagai cawapresnya. Padahal, saat itu, Partai Demokrat merupakan bagian dari Koalisi Perubahan.

“SBY adalah mantan Presiden RI dua periode. Publik yang menjadikan SBY panutan-nya tentulah masih banyak. Kritikan yang keras dari mantan presiden dua periode tentu bisa mempunyai efek pada persepsi yang berkembang di publik,” jelas Adjie.

Sementara itu, Cak Imin yang sudah secara resmi dideklarasikan sebagai cawapres masih kalah populer dan disukai dibandingkan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Bahkan, popularitas Cak Imin tidak menyentuh angka 50 persen.

“Popularitas atau pengenalan

AHY sebesar 65,9 persen. Popularitas Muhaimin sebesar 49 persen. Popularitas keduanya terpaut 16,9 persen,” kata Adjie.

Direktur Eksekutif Ethical Politics, Hasyibulloh Mulyawan, mengatakan, dirinya sejak awal sudah memprediksi bahwa elektabilitas Anies Baswedan pasca diduetkan dengan Cak Imin terdegradasi.

“Sebenarnya saya sudah memprediksi elektabilitas Anies atau pasangan AMIN ini akan mengalami kemerosotan secara elektoral,” kata Iwan kepada Info Indonesia, Selasa, 3 Oktober 2023.

Adapun penyebab elektabilitas pasangan tersebut tidak beranjak dari zona degradasi ketika SBY menyampaikan statement terkait sikap NasDem yang secara sepihak menggaet Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan.

“Stigma melalui narasi komunikasi politik yang dibangun oleh Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, (ketika) Partai NasDem memutuskan secara sepihak menggandeng Cak Imin sebagai calon wakil presiden,” jelas Iwan.

Apalagi pasca penetapan Cak Imin sebagai cawapres dari Koalisi Perubahan, Partai Demokrat terus menggaungkan sosok Anies Baswedan sebagai pengkhiran dan tidak amanah. Hal itu sangat mempengaruhi terhadap elektabilitas

kedua tokoh tersebut.

“Sehingga amplifikasi narasi ini secara langsung masuk ke dalam benak persepsi publik yang berimplikasi pada penurunan elektoral,” kata Iwan.

Dia menyampaikan bahwa posisi Cak Imin sebagai calon wakil presiden tidak memiliki tarikan elektoral untuk bisa meningkatkan elektabilitas Anies Baswedan sebagai calon presiden.

“Pertama, Cak Imin selama ini sudah melakukan roadshow kebangsaan ke berbagai daerah dan melakukan canvassing melalui baliho-baliho, namun nyatanya tidak bisa juga menaikkan elektabilitasnya,” jelas Iwan.

Apalagi, saat ini, Wakil Ketua DPR RI itu sedang berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pusaran dugaan kasus korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan eranya kala itu.

“Ini jelas menurunkan kredibilitas dan citra positif pasangan AMIN dan menyebabkan kemerosotan elektoral pasangan tersebut,” kata Iwan.

Lebih lanjut, Iwan menyampaikan, sebenarnya Koalisi Perubahan sangat dilematis. Sebab, jika Cak Imin tidak diangkat sebagai cawapres, PKB diyakini akan menarik diri. Hal ini pun akan berpengaruh terhadap syarat pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) sebesar 20 persen.

“Artinya Anies dan Nasdem mengalami sesuatu yang dilematis karena satu sisi Cak Imin dipasangkan dengan Anies menggerus suara Anies, walaupun tidak dipasangkan Anies tidak bisa berkontestasi dalam Pilpres,” ujar Iwan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Sentral Politika, Subiran Parida-

mos, menilai turunnya elektabilitas Anies Baswedan pasca deklarasi dengan Cak Imin karena masih butuh penajakan antara kedua tokoh tersebut.

“Sebab, keduanya baru dideklarasikan dan masih perlu penajakan basis pemilih di bawah,” kata Subiran, Kamis, 5 Oktober 2023.

Selain itu, pendukung atau pemilih PKB dan PKS berseberangan dan tidak dapat menyatu. Hal ini juga sangat mempengaruhi dukungan yang diterima Anies Baswedan.

“Apalagi, kita tahu bahwa basis pemilih PKB dan PKS ini punya historikal yang kontradiktif,” jelas Subiran.

Dia menjelaskan, seluruh partai politik pendukung duet AMIN harus bisa menyatukan akar rumputnya masing-masing, bukan hanya di tingkat para elit. Sebab, keompokan akar rumput sangat penting dalam memenangkan pasangan AMIN di Pilpres 2024.

“Jadi perlu konsolidasi dan negosiasi politik di akar rumput, bukan hanya di elit,” terang Subiran.

Subiran menambahkan, seharusnya pasangan AMIN bertemu pendukung akar rumput dari masing-masing partai pengu-sung. Itu dilakukan untuk menunjukkan seluruh pendukung mereka dari tingkat yang paling rendah solid mendukungnya.

“Ini kesempatan Anies dan Cak Imin untuk keliling meyakinkan dan menunjukkan bahwa keduanya tidak kontradiktif, bahkan sangat cocok,” kata Subiran.

Menurutnya, duet Anies Baswedan-Cak Imin adalah pasangan yang paling rasional, baik secara elektoral, ceruk, basis pemilih, dan branding. Namun, pasangan ini memiliki basis massa yang historikal kontradiktif.

“Maka perlu negosiasi dan konsolidasi. Saya pikir kalau sudah klik, surveinya perlahan akan naik juga,” tutur Subiran.

Dia mengatakan, penurunan elektabilitas Anies Baswedan bukan hanya karena Cak Imin tidak menjual. Akan tetapi, ada beberapa tokoh Nahdlatul Ulama (NU) yang muncul di ruang publik. Sehingga, suara Cak Imin terbelah.

“Jadi wajar kalau basis suara dibawah terpecah,” tandas Subiran.

•RDO







“Jika NU yang diambil, mengerucut ke dua nama, yakni Mahfud MD dan Khofifah. Keduanya tokoh NU, dekat dengan Bu Mega dan dihormati”

**Zaki Mubarak**

# GANJAR AMANKAN SUARA NU

**Keputusan PDIP yang hingga kini belum memungkinkan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 memunculkan rasa penasaran publik.**

Sejumlah pihak menilai, keputusan PDIP yang belum resmi memutuskan sosok pendamping Ganjar merupakan manuver politik Megawati Soekarnoputri untuk terlebih dahulu melihat situasi menjelang Pilpres 2024.

PDIP sebagai partai nasionalis diyakini bakal kembali memilih cawapres untuk Ganjar dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU) untuk mengamankan suara organisasi Islam terbesar di Indonesia itu.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta, Zaki Mubarak, menilai, wacana Ganjar mengamankan suara NU kemungkinan bakal terjadi karena strategi politik PDIP sejak dahulu memang selalu mengupayakan untuk membentuk kerja sama dengan kelompok agamis.

Selain itu, berdasarkan catatan sejarah, pengalaman penyatuan gerakan nasionalis dan agamis juga lebih dulu dilakukan oleh Bung Karno yang menjadikan NU mitra strategis dalam berjuang secara politik melawan kolonialisme Belanda.

“Ya, memang sejak dulu rumus dari Mega untuk kepemimpinan nasional: Nasionalis-Islam. Yang dimaksud kekuatan Islam itu tentu Nahdliyin. Mitra setia dari Presiden Soekarno. Pakem itu masih dipegang hingga saat

ini,” ujar Zaki, Jumat, 6 Oktober 2023.

Zaki menilai, jika PDIP kembali mengambil pendamping Ganjar dari tokoh NU, maka kemungkinan akan mengerucut ke dua nama, yakni Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Berdasarkan survei yang banyak dilakukan sejumlah lembaga survei, Mahfud MD dan Khofifah acap kali memperoleh suara elektabilitas yang tinggi dan dinilai cocok mendampingi Ganjar Pranowo di Pemilu 2024.

Zaki mengungkapkan, baik Mahfud MD atau Khofifah, keduanya memiliki elektabilitas yang cukup tinggi. Bahkan, posisi kedua tokoh bangsa itu sama-sama memiliki track record cukup mumpuni, dapat menjadi kutub magnet menggaet suara NU di ujung dan tengah Pulau Jawa.

“Jika NU yang diambil, betul mengerucut ke dua nama itu, yakni Mahfud MD dan Khofifah. Keduanya tokoh NU dekat dengan Bu Mega dan dihormati di kalangan banteng. Diharapkan salah satu dari dua tokoh tersebut nanti dapat menjadi magnet untuk menggaet suara NU di Jatim dan Jateng,” kata Zaki.

Selain itu, Zaki menilai, komunikasi yang baik dan kedekatan emosional dari Mahfud dan Khofifah dengan seluruh elit PDIP juga merupakan pintu masuk bagi Ganjar untuk mendapat simpati kelompok Nahdliyin.

“Juga jangan lupa untuk membangun image baik bahwa PDIP bersahabat dengan Islam. Keduanya juga telah jauh hari didekati PDIP,” terang Zaki.

Namun, meski dapat menjadi magnet suara, belum tentu PDIP ataupun Ganjar langsung memilih salah satu dari keduanya. Sebab, PDIP pernah melakukan hal yang sama pada Pemilu 2019, yakni memilih Maruf Amin di saat terakhir. Padahal, sebelumnya Mahfud MD dikabarkan sebagai calon kuat menjadi cawapres Jokowi.

Oleh karena itu, Zaki menuturkan, dalam politik kemungkinan

manuver di akhir jelang penetapan pendaftaran capres dan cawapres itu akan terjadi. Hal itu mengingat dalam kontestasi kali ini persaingan bakal lebih ketat dari Pemilu 2019 karena terdapat tiga calon yang akan maju.

“Mahfud sangat bagus, sebagai sosok politisi senior yang negarawan, berintegritas dan pengalaman. Tapi di sisi lain itu jadi titik lemahnya. Ganjar akan “kalah awu” jika bersanding dengan Mahfud yang punya nama besar,” jelas Zaki.

“Pak Mahfud akan sangat dominan dan lebih powerful, mungkin saja itu dianggap tidak ideal atau malah mengganggu. Bu Mega cenderung pada pilihan tokoh moderat, tidak terlalu ambisius, dan bisa dikendalikan,” sambung Zaki.

Menurut Zaki, Khofifah yang dikenal anggun dan memiliki track record cukup baik dalam pemerintahan lebih berpotensi dipilih PDIP dibandingkan Mahfud MD.

“Posisinya setara dengan Pak Ganjar. Jadi Ganjar juga tidak kalah awu. Ibu Mega juga senang dan nyaman dengan Khofifah yang jarang membuat kontroversi. Tapi bukan tidak mungkin akan ada kejutan,” tutur Zaki.

Zaki menambahkan, calon lain yang mungkin bakal muncul pada akhir pendaftaran capres-cawapres yakni Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf. Potensi terpilihnya Gus Yahya mendampingi Ganjar bisa saja terjadi lantaran selama ini dikenal sebagai figur yang santun, tidak banyak kontroversi, populer di kalangan masyarakat dan memiliki basis masa paling besar dibandingkan Mahfud MD dan Khofifah.

Zaki mengatakan, pengaruh Gus Yahya dalam membantu mendorong elektabilitas Ganjar lebih besar daripada Mahfud MD dan Khofifah karena dapat menyatukan suara NU di seluruh Indonesia. Di sisi lain, jika Mahfud MD atau Khofifah yang dipilih, maka

potensi suara NU akan terbelah dengan Cak Imin sebagai cawapres Anies Baswedan.

Pengamat Politik Indonesia Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai, Pemilu kali ini hampir dapat dipastikan seluruh kandidat capres yang telah resmi diusung koalisi masing-masing parpol akan menggaet tokoh NU sebagai cawapres.

Karyono mengatakan, fenomena penentuan dan pemilihan cawapres serba NU itu dapat terjadi karena organisasi tersebut memiliki jumlah masa yang sangat besar yang mampu membantu capres memenangkan Pilpres 2024.

“Saya melihatnya jangan-jangan ada design siapapun pasangannya nanti capresnya atau wakilnya dari NU. Saya juga telah mencium aroma seperti itu ya,” ungkap Karyono.

Karyono menyebut fenomena capres berebut suara NU bukan hal yang baru terjadi di Indonesia. Sebab, dalam sejarah digelarnya Pemilu, para tokoh NU selalu menghiiasi ruang konstelasi politik nasional dengan budaya Islam tradisionalnya.

Karyono mengatakan, pemilihan tokoh NU menjadi cawapres dilakukan para capres maupun elit partai dalam rangka mencegah munculnya gerakan yang diduga radikal dalam penyelenggaraan Pemilu 2024.

Kendati demikian, dengan fenomena capres berebut suara dan menggaet tokoh NU menjadi cawapres akan berimplikasi tersebarunya suara NU di masing-masing kandidat.

Dalam hal ini, capres yang berhasil keluar sebagai pemenang tidak terlepas dari figur tokoh NU yang lebih dipercaya Masyarakat, terutama dalam pengalamannya di kancah politik nasional.

“Jadi bukan PDIP saja yang berkoalisi dengan NU, bukan koalisi lah ya istilahnya, tapi berebut pemilih di kandang NU. Jadi bukan hanya PDIP menu-

rut saya, tapi semua capres ini, baik Pranowo, Ganjar maupun Anies. Jadi semuanya itu berebut para pemilih NU,” pungkask Karyono. •RDO





“Posisinya Bawaslu akan melakukan proses pengawasan terhadap upaya yang sedang dilakukan KPU untuk menuju penyusunan DCT gitu”

*Lolly Suheni*



# AWASI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG

**Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyoroti aturan terkait syarat pendaftaran bagi bakal calon legislatif yang memiliki catatan hitam pernah menjadi terpidana korupsi.**

**S**yarat pendaftaran menjadi caleg bagi para mantan napi koruptor telah diatur Komisi Pemilihan Umum (KPU) didalam PKPU 10 dan 11 Tahun 2023.

Munculnya aturan tersebut juga menuai kritik tajam sejumlah elemen masyarakat lantaran dinilai memberikan karpet merah terhadap para mantan napi koruptor untuk maju menjadi caleg di Pemilu 2024. Dalam aturan itu, KPU dinilai telah mengubah atau menafsirkan sendiri syarat ketentuan mengenai mantan napi koruptor yang ingin mendaftar caleg yang telah diatur dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.

UU Pemilu menyebutkan mantan terpidana kasus korupsi dapat ikut serta mendaftarkan diri menjadi caleg apabila telah mengikuti masa jeda waktu lima tahun setelah menjalani hukuman pidana penjara.

Sedangkan, PKPU 10 dan 11 Tahun 2023 telah mengatur syarat mantan terpidana korupsi langsung bisa mendaftarkan diri untuk menjadi caleg jika dalam putusan pengadilan menambahkan sanksi berupa pencabutan hak politik sesuai dengan putusan perkara yang ditentukan.

Alhasil, sejumlah pemerhati pemilu, baik secara organisasi dan individu, kemudian mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) terkait PKPU 10 dan 11 2023 tersebut. Dalam putusnya, MA telah menyatakan PKPU Nomor 10 dan 11 bertentangan dengan UU Pemilu.

Berkaitan dengan putusan MA, KPU kemudian menindaklanjuti dengan mengeluarkan surat No 1075/PL.01.4-SD/05/2023 yang secara garis besar meminta kepada seluruh partai politik peserta Pemilu 2024 untuk memedomani putusan MA itu.

Anggota Bawaslu, Lolly Suheni, menilai, tindakan KPU yang langsung menindaklanjuti putusan MA dengan penerbitan surat keputusan yang memerintahkan kepada partai politik peserta pemilu 2024 memedomani keputusan MA merupakan langkah yang tepat.

Lolly menyebut, PKPU 10 dan 11 Tahun 2023 bertentangan dengan UU Pemilu bersifat mengikat dan harus segera dijalankan. Namun, dia juga mengingatkan KPU bahwa dalam klausul putusan MA menyebutkan secara garis besar PKPU 10

dan 11 Tahun 2023 itu tidak berlaku secara umum dan mengikat lantaran dinyatakan telah bertentangan dengan UU Pemilu.

“Kalau kita membaca dari klausul putusan MA itu, sesungguhnya dia tegas menyatakan bahwa bertentangan dengan hukum diatasnya. Dalam konteks ini kan UU 7/2017, sehingga dinyatakan tidak berlaku secara umum dan tidak mengikat kan,” kata Lolly, Kamis, 5 Oktober 2023.

“Jadi konteks pernyataan itu tegas ya dari putusnya MA, sehingga sesungguhnya mau ada revisi PKPU atau tidak ya memang sudah kewajiban untuk dilaksanakan karena sifatnya jelas menyatakan bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi,” sambung Lolly.

Menurut Lolly, KPU sebaiknya harus segera merevisi PKPU 10 dan 11 Tahun 2023 demi mencegah munculnya potensi hal-hal yang diduga menjadi pelanggaran Pemilu 2024.

Meski begitu, Lolly juga memaklumi sikap KPU yang tak langsung merevisi PKPU 10 dan 11 lantaran saat ini sesuai jadwal sudah memasuki kegiatan tahapan penyusunan data Daftar Calon Tetap (DCT) caleg, sehingga keputusan untuk memperbaiki aturan teknis berbenturan dengan waktu penyelenggaraan

tahapan pemilu.

“Jadi bagi Bawaslu itu melihatnya mau KPU mengeluarkan revisi terhadap PKPU atau tidak, maka kita lihat dulu konteksnya apa. Bahwa KPU itu menindaklanjuti ya dia tindaklanjuti ya kan melalui Surat Keputusan Nomor 1075, tapi nanti silakan saja dikroscek langsung ke KPU kenapa mereka merasa tidak perlu untuk melakukan revisi terhadap PKPU,” tutur Lolly.

“Bisa jadi juga keputusan tidak merevisi karena menghitung berbagai tahapan yang sedang berjalan, sehingga konteksnya adalah putusan tegas dari MA itu ditindaklanjuti melalui surat 1075,” sambung Lolly.

Lolly memastikan, pihaknya bakal melakukan upaya penanganan secara melekat terhadap kegiatan penyusunan dan penetapan DCT caleg yang bakal diumumkan pada 04 November 2023.

Dalam konteks ini, Bawaslu memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap tindaklanjutan putusan MA, apakah benar-benar dilaksanakan oleh KPU ataupun partai politik peserta Pemilu 2024.

Kegiatan pengawasan secara melekat itu harus dilakukan oleh Bawaslu demi memastikan dan mengawal putusan MA apakah sudah dilaksanakan, sehingga mencegah terjadinya potensi dugaan pelanggaran Pemilu 2024.

“Bawaslu punya kewajiban untuk melakukan penga-

wasan terhadap dijalankannya putusan kayak gitu kan. Posisinya maka Bawaslu akan melakukan proses pengawasan terhadap upaya yang sedang dilakukan KPU untuk menuju penyusunan DCT gitu,” kata Lolly.

“Jadi nanti kita lihat ujungnya di 3 November ya dari 4 Oktober kemarin sampai 3 November. Jadi nanti kita lihat pada prinsipnya apakah semua itu sudah berjalan. KPU juga menindaklanjuti melalui Surat Putusan Nomor 1075, kita lihat ya nanti dalam perjalanan seperti apa,” lanjut Lolly.

Lolly juga menitikberatkan permasalahan yang akan muncul pada kegiatan pengawasan yang dilakukan dalam penyusunan dan penetapan DCT. Potensi masalah itu akan muncul lantaran hingga saat ini, Bawaslu belum juga mendapat akses secara menyeluruh mengenai Sistem Informasi Pencalonan (Silon).

Adapun Silon merupakan alat bantu utama bagi KPU untuk menyimpan seluruh data dari para bakal caleg, termasuk mengenai catatan keterangan pidana terkait kasus korupsi. Atas dasar itu, Lolly menuturkan pihaknya bakal mengalami masalah ataupun kesulitan untuk melakukan pencegahan terkait lolosnya bakal caleg mantan napi koruptor.

“Sejauh ini memang kami belum mendapatkan informasi karena karena memang kan kita enggak punya akses Silon terhadap calon ya, sehingga kita kesulitan untuk melakukan upaya deteksi dini dalam konteks mencegah,” terang Lolly.

Lolly mengaku bakal melakukan upaya lain untuk melakukan pengawasan terkait kegiatan penyusunan hingga penetapan DCT itu, yakni dengan melakukan pencermatan terhadap seluruh data bakal caleg. Adapun pencermatan data DCT itu saat ini sudah mulai dikonsolidasikan dari tingkat bawah hingga ke atas.

“Jadi kami sekarang ini juga sedang melakukan konsolidasi data ya, konsolidasi data dari tingkat bawah untuk di rekap di tingkat nasional. Nah kita melakukan konsolidasi data sejauh ini kita belum mendapatkan informasi karena memang sedang berproses konsolidasi data itu ya kita tunggu aja,” ucap Lolly.

Lolly menjelaskan, dalam konteks pengawasan terhadap DCT itu bakal dilakukan dengan cara pencermatan manual, yakni dengan melihat data riwayat pekerjaan dan riwayat perjalanan hukum masing-masing bakal caleg yang mendaftar.

Lolly menerangkan, upaya itu harus dilakukan demi menjalankan kewajiban pengawasan meski saat ini dalam kondisi masih dibatasinya akses Silon oleh KPU.

Lolly menambahkan, pengawasan melalui cara pencermatan data dengan melihat riwayat dari pekerjaan dan perjalanan hukum masing-masing. Bakal caleg itu dilakukan dalam rangka memastikan jika terdapat data yang melanggar putusan MA maka akan segera ditindaklanjuti untuk segera dicoret dari data DCT tetap. ●RDO







“KPU mesti melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yakni MA”

Nurlia Dian Paramita

INFO  
KPU

7

Minggu II • Oktober 2023

# KPU TETAP BERI KARPET MERAH NAPI KORUPTOR

**Peraturan teknis yang dibuat Komisi Pemilihan Umum (KPU) soal pencalonan mantan terpidana korupsi dalam pemilihan legislatif, memunculkan pro kontra. Bahkan, yang disebut PKPU 10/2023 tentang Pencalonan Anggota DPR dan DPRD, beberapa pasal terkaitnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA) usai digugat sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM).**

Putusan MA atas Perkara Nomor 28 P/HUM/2023 yang diajukan Indonesia Corruption Watch (ICW), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), hingga bekas pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yakni Abraham Samad dan Saut Situmorang, menyatakan Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/2023 bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu.

Inti dari Putusan MA atas perkara tersebut mengamini dalil gugatan para Pemohon, yang menganggap beleid KPU itu menunjukkan kurangnya komitmen dan semangat pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal itu karena mengabaikan masa jeda waktu lima tahun bagi mantan narapidana korupsi yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, kalau dalam vonis mereka memuat pidana tambahan pencabutan hak politik.

Pasalnya, dalam PKPU 10/2023 dimasukkan aturan yang kurang lebih berbunyi; “apabila seorang napi kasus korupsi mendapat vonis pencabutan hak politik selama setahun misalnya, maka pada tahun kedua ia langsung bisa mencalonkan diri sebagai anggota legislatif tanpa menunggu masa jeda lima tahun setelah lepas dari hukuman penjara yang diatur UU Pemilu dan ditegaskan di putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022 dan Nomor 12/PUU-XXI/2023.”

Imbas dari Putusan MA tersebut, seharusnya KPU menindaklanjuti dengan melakukan perubahan atau merevisi PKPU 10/2023. Namun, Anggota KPU RI, Idham Holik, justru berkelit seolah-olah akan menindaklanjuti pasca mengkonsultasikan Putusan MA dengan sejumlah pakar.

“Berkaitan dengan pelaksanaan Putusan MA tersebut, ada ahli yang menyatakan bahwa hal tersebut tidak perlu menunggu perubahan PKPU. Karena kita ketahui, perubahan

PKPU itu harus melaksanakan ketentuan pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7/2017,” ujar Idham dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi swasta nasional, sehari setelah Rapat Konsultasi dengan sejumlah pakar di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Selasa, 3 Oktober 2023.

Selain Idham, Anggota KPU RI lainnya yaitu Mochammad Afifuddin juga menunjukkan gelagat yang sama, seolah Putusan MA bisa ditindaklanjuti dengan tidak hanya merevisi PKPU 10/2023. Fatalnya, dia malah menyalahkan awak media yang meliput Rapat Konsultasi bersama para pakar hukum tata negara dan hukum administrasi negara, karena tidak masuk ke dalam acara yang sebenarnya tertutup alias tidak bisa diliput.

“Setelah ini kita matangkan untuk merumuskan tindak lanjut putusan itu. Maksudnya kita tindak lanjut nih. Bentuknya apa? Sedang kita rumuskan,” ujar Afifuddin di Hotel Gran Melia, Jakarta Selatan, Senin, 2 Oktober 2023.

“Tadi enggak masuk sih (ke dalam ruang acara rapat konsultasi),” tambah Afif.

Terbukti pada Rabu, 4 Oktober 2023, KPU mengeluarkan surat nomor 1075/PL.014-SD/05/2023 yang sifatnya penting, dengan perihal “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung”, dan ditandatangani Ketua KPU RI, Hasyim Asyari pada 1 Oktober 2023. Isi dari surat itu, pokoknya mengurai ulang isi Putusan MA, sekaligus membuat imbauan kepada partai politik untuk memedomani Putusan MA.

Masalah ini turut disoroti

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Nurlia Dian Paramita, yang menilai Putusan MA bisa ditindaklanjuti KPU tanpa harus merevisi pasal terkait pencalonan mantan napi korupsi di PKPU 10 dan 11 Tahun 2023. Tetapi, dia menitikberatkan pada pelaksanaan Putusan MA.

“KPU mesti melaksanakan apa yang telah menjadi keputusan hukum yang dilakukan oleh lembaga peradilan, yakni MA. Karena eksistensi pasal yang bermasalah, yakni Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (2) PKPU 10/2023 sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan berlaku umum. Apabila KPU mengabaikan, maka KPU telah melakukan tindakan inkonstitusional dan arogansi dalam ber hukum,” ujar Mita kepada Info Indonesia, Kamis, 5 Oktober 2023.

Menurutnya, putusan MA dalam melakukan judicial review terhadap peraturan di bawah undang-undang telah dijamin dalam konstitusi yaitu UUD 1945, dan merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia, tepatnya dimuat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945).

“Dengan posisi tersebut, tanpa KPU mengubah atau merevisi PKPU 10/23 tersebut, KPU wajib menindaklanjuti putusan MA itu, maka tidak ada alasan lagi KPU untuk berkonsultasi kepada DPR dalam menindaklanjuti putusan MA itu,” tuturnya.

Di samping itu, Mita juga memandang seharusnya KPU memahami bahwa putusan judicial review norma dalam PKPU 10/2023 tentang pencalonan mantan napi korupsi merupakan bentuk check and balance, atau kontrol cabang kekuasaan negara ter-

hadap kekuasaan negara lainnya, yakni kekuasaan yudisial (MA) terhadap lembaga negara yang memiliki kekuasaan legislatif.

“Meskipun kekuasaan legislatif yang dimiliki KPU bersifat quasi atau semu legislasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dengan KPU sebagai lembaga negara penunjang yang bersifat mandiri. Maka dengan KPU berdalil menunggu konsultasi DPR telah memberikan kesan bahwa KPU tidak memposisikan sebagai lembaga mandiri dengan mengabaikan konstitusi, sistem ketatanegaraan dan sistem hukum di Indonesia,” keluhnya.

Oleh karena itu, Mita berpendapat tindakan KPU yang mengabaikan putusan MA dapat dikatakan telah menciderai muruah penyelenggara Pemilu sebagai lembaga publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat umum, bukan segelintir orang yang memiliki kepentingan, khususnya dalam dunia politik praktis dalam Pemilu.

“KPU telah melakukan arogansi dalam ber hukum. Kemandirian KPU itu dituntut bukan hanya pada tindakannya yang mandiri, tapi juga harus terlihat mandiri di mata publik. Menurut saya wajar jika publik beranggapan bahwa KPU hari ini diduga telah terseret oleh pusaran politik praktis, karena potret KPU tersebut bukan kali pertama, sebelumnya publik telah mendesak dan mengkritik KPU terkait pengaturan keterwakilan perempuan dalam PKPU 10/2023,” urainya.

“Hingga akhirnya, KPU melakukan konferensi dan berjanji akan merevisi (aturan terkait keterwakilan 30 persen perempuan), namun tidak jadi merevisi PKPU tersebut dengan alasan hasil konsultasi dengan DPR, dan pada akhirnya pasal tersebut dibatalkan oleh MA,” sambung Mita.

Dengan demikian, dia menganggap peraturan perundang-undangan yang dibuat KPU itu mengesankan bahwa politik hukum yang dilakukan oleh KPU tidak berpihak pada publik/masyarakat, namun berpihak pada elite politik.

“Secara moral pun, tindakan KPU dianggap tidak patut dengan mengatur Pasal 11 ayat (6) PKPU 10/23 tersebut, karena menegasikan semangat publik untuk memberikan ketegasan sanksi hukum bagi mantan narapidana, khususnya mantan napi pejabat yang koruptor yang selama ini telah diperjuangkan publik yang peduli terhadap nasib negara dan bangsa ini,” ucapnya.

“Rangkaian peristiwa tindakan KPU ini jangan sampai membuat publik pesimis terhadap penyelenggaraan Pemilu Serentak 2024 yang demokratis dan berintegritas karena tidak patuh terhadap hukum, apalagi berniat untuk menjalani atau melaksanakan hukum dengan baik,” tutup Mita. •RDO







I Nyoman Subanda

# PENANTANG PETAHANA KEKUATAN BELUM SEPADAN

**I Wayan Koster merencanakan untuk bersantai sejenak di desanya setelah melepaskan jabatannya sebagai Gubernur Bali.**

**S**oal partisipasinya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Bali 2024 mendatang, Wayan Koster menyatakan bahwa bergantung pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.

Meskipun calon gubernur yang akan didukung oleh PDIP berada di bawah kendali DPP, Gubernur yang baru saja menyelesaikan satu periode jabatannya tetap berharap untuk mendapatkan doa restu dari masyarakat Bali selama periode keduanya.

“Ya kan nanti tergantung penugasan partai. Mohon doa restu untuk periode yang kedua,” ujar Wayan Koster.

Bahkan Wayan Koster dengan yakin menyatakan sumber pendapatan bagi Provinsi Bali akan bertambah jika terpilih kembali pada Pilgub 2024.

“Di periode kedua, sumber pendapatan (Bali) sudah meningkat. Saya sudah mencari sumber pendapatan daerah yang lain. Kalau mengikuti undang-undang, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB/BBNKB) tetap sama. Sepuluh tahun menjabat gubernur, belum ada perubahan apa pun,” jelasnya.

Secara tersirat, Koster menyikapi kemungkinan menggandeng Cok Ace untuk periode kedua.

“Oh ya. Kenapa kita harus berpisah?” kata Koster.

Ia pun mengutarakan pendapat pribadinya mengenai kinerja Cok Ace selama 4 tahun 5 bulan menjabat wakil gubernur mendampinginya.

“Beliau orangnya baik, sopan dan menjalankan

tugasnya dengan efektif. Komunikasi kita selalu baik,” tambah Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Bali ini.

Menanggapi hal tersebut, mantan Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati menyatakan keinginan Koster mencerminkan kemauan masyarakat.

“Iya, sebenarnya permintaannya juga mencerminkan keinginan mayoritas masyarakat dan dia tidak akan mengundang saya jika masyarakat tidak memberinya lampu hijau. Untuk apa dia mengambil risiko dengan mengundang saya?,” katanya.

Pria yang akrab disapa Cok Ace juga menyebutkan hubungan kerja sama yang baik dengan Koster semasa kepemimpinannya di Bali.

Ia menegaskan, dirinya telah berupaya semaksimal mungkin sebagai wakil gubernur dan menjalankan program-program yang ada.

“Saya sudah bekerja semaksimal mungkin bersama Gubernur Koster. Pokoknya saya wakilnya, dan dia Gubernur Bali. Jadi, saya harus selaraskan dengan program-program beliau,” tambahnya.

Saat ditanya kesediaannya mendampingi Koster di Pilgub 2024, Cok Ace enggan menjawab pasti.

Cok Ace pun mengakui, hubungan dengan Gubernur Koster selama ini baik-baik saja.

“Selama ini sudah baik, sangat harmonis, saling mendukung,” imbuhnya.

Di sisi lain, DPD PDIP Bali memberikan tanggapan terkait harapan Wayan Koster untuk mendapatkan doa restu dari masyarakat Bali.

Bendahara DPD PDIP Bali, Dewa Made Mahayadnya, yang juga menjabat sebagai Ketua Fraksi PDIP DPRD Bali, meny-

atakan bahwa kader PDIP Bali yang telah menunjukkan kinerja dan prestasi yang baik seharusnya direkomendasikan sebagai calon Gubernur Bali untuk kedua kalinya.

“Kader yang sudah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan penuh dengan prestasi harus direkomendasikan maju sebagai Gubernur untuk yang kedua kalinya,” ungkap Dewa Jack, sebagaimana ia dikenal.

Ketika ditanya mengenai dukungan dari DPC PDIP Kabupaten/Kota di seluruh Bali, Dewa Jack tidak dapat memberikan banyak komentar. Ia menjelaskan bahwa PDIP memiliki mekanisme tersendiri sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai tersebut.

Sementara, Pengamat Politik I Nyoman Subanda berpendapat bahwa meskipun popularitas I Wayan Koster kemungkinan akan mengalami penurunan setelah tidak lagi menjabat sebagai Gubernur Bali pada bulan September 2023 dan digantikan oleh penjabat sementara, namun ia tetap akan menjadi figur yang kuat dalam Pilgub Bali 2024.

Menurut Subanda, penurunan popularitas Wayan Koster setelah meninggalkan jabatan gubernur disebabkan oleh fakta bahwa Koster tidak lagi memiliki alat komunikasi dan sarana untuk berinteraksi dengan masyarakat seperti saat ia masih menjabat sebagai gubernur.

“Misalnya, Koster tidak akan lagi dapat melakukan kunjungan ke daerah, membuka acara, atau memberikan bantuan kepada masyarakat, yang tentu saja akan berdampak pada penurunan popularitasnya. Namun, meskipun begitu, popularitasnya tetap akan kuat,” kata Sub-

anda.

Subanda menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang akan menjaga popularitas Wayan Koster tetap tinggi.

Pertama, selama masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Bali, Koster mendapatkan apresiasi yang tinggi atas berbagai program pembangunan yang telah dijalkannya.

“Koster telah melakukan pembangunan Pelabuhan di Denpasar, pembangunan di Besakih, shortcut di Buleleng, rencana pembangunan Tol dan pembangunan PKB di Klungkung. Meskipun program-program ini mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat, mereka akan tetap mengingatnya,” ungkapnya.

Selanjutnya, faktor kedua adalah keberadaan mesin partai PDIP-P yang mendukung Koster. Subanda mencatat bahwa PDIP-P adalah partai yang kuat dan berpengaruh di Bali. Di seluruh kabupaten/kota di Bali, PDIP-P memiliki kader-kader yang menduduki posisi kepala daerah dan anggota DPRD.

“Dengan dukungan dari mesin partai PDIP-P, Koster akan tetap menjadi salah satu calon kuat dalam Pilgub Bali. Mesin partai ini juga akan menjaga popularitasnya tetap tinggi saat Pilgub nanti,” tambahnya.

Terakhir, faktor ketiga adalah kurangnya figur atau sosok yang muncul sebagai penantang bagi Koster dalam Pilgub Bali. Subanda berpendapat bahwa situasi ini justru akan menguntungkan dan memperkuat posisi Koster.

“Dengan tidak adanya calon lawan yang muncul hingga saat ini, baik dari partai politik maupun sebagai calon independen, Koster akan memiliki keunggulan yang signifikan. Inilah yang membuatnya sulit untuk dikalahkan,” pungkasnya. • IRY







“Melihat situasi ekonomi NTB saat ini, kita sangat tergantung pada ekonomi negara lain seperti Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi”

Saipul Hamdi

# VISI DAN SOLUSI TOKOH BARU UNTUK NTB

Sejumlah nama mulai mencuat ke permukaan untuk bersaing di pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB).

**N**ama mantan Gubernur NTB Zulkieflimansyah disebut-sebut bakal maju untuk periode kedua. Hanya saja, dirinya masih belum memutuskan siapa yang akan menjadi pasangannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 mendatang.

Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang akrab disapa Bang Zul ini mengungkapkan bahwa dia tidak ingin terburu-buru mengumumkan pasangan Zul-Rohmi Jilid 2.

Meskipun begitu, Bang Zul menepis rumor bahwa pasangan Zul-Rohmi akan berpisah dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

Namun, dia juga belum memastikan apakah akan berpasangan dengan Rohmi kembali atau tidak.

“Kami tidak menyandera diri kami, bahwa kami harus jadi Gubernur lagi periode kedua. Harus bersatu lagi, itu nanti pasar yang menentukan,” kata Bang Zul, belum lama ini.

Dalam periode setahun ini, Bang Zul berencana untuk terus melakukan survei guna memahami peluangnya dalam Pilkada NTB berikutnya. Dia menyadari bahwa perubahan tren bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor.

“Kalau dalam waktu setahun ke depan, masyarakat tidak menginginkan, kita jadi malu juga mendorong diri maju bersama,” tutup Bang Zul.

Zul-Rohmi mengakhiri jabatan mereka sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada Selasa, 19 September 2023.

Sedangkan nama lain yang ikut mencuat adalah tentang kemungkinan partisipasi Staf Khusus Menteri Luar Negeri Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal dalam Pilgub NTB 2024 dinilai sebagai perkembangan positif.

Pengamat politik dari Universitas Mataram (Unram) Dr Saipul Hamdi

mengungkapkan pandangannya tentang potensi Lalu Iqbal yang sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Turki dari tahun 2019 hingga 2023, memiliki pengalaman birokrasi yang kuat dan tidak diragukan.

“Menurut pandangan saya, Mas Iqbal memiliki peluang yang besar. Meskipun saya belum sering melihatnya berinteraksi dengan masyarakat,” ujar Saipul.

Menurut Saipul, sebagai calon yang relatif baru dalam Pilgub NTB, Lalu Iqbal perlu berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat. Dia juga menyarankan agar Lalu Iqbal sering muncul di media untuk menjelaskan visi dan solusi yang akan dia tawarkan untuk NTB di masa depan.

Selain itu, Saipul menyatakan bahwa ada banyak isu yang bisa diangkat oleh Lalu Iqbal untuk menarik perhatian masyarakat, seperti isu kesejahteraan masyarakat dan jumlah pekerja migran Indonesia (PMI) di NTB yang terus meningkat setiap tahunnya.

“Terutama melihat situasi ekonomi NTB saat ini, kita sangat tergantung pada

ekonomi negara lain seperti Malaysia, Hongkong, dan Arab Saudi,” katanya.

Saipul berpendapat bahwa Lalu Iqbal tidak harus selalu berkomentar tentang masalah yang berat. Menurutnya, ada banyak masalah kecil di NTB yang juga perlu mendapatkan perhatian, seperti sektor pertanian dan janji pemerintah terkait pengembangan industri.

Dengan demikian, Saipul melihat bahwa peluang bagi tokoh baru seperti Lalu Iqbal dalam Pilgub NTB 2024 sangat terbuka. Namun, ia menekankan pentingnya Lalu Iqbal untuk mendekatkan diri kepada para pemimpin partai politik di NTB karena dukungan partai akan menjadi faktor kunci dalam perjalanan politiknya.

“Dia harus mendekati para pemimpin partai politik. Kekurangan dukungan partai adalah tantangan pertama yang perlu diatasi. Jika partai tidak mendukung, itu akan menjadi kendala serius,” tambah Saipul.

Seperti yang telah diketahui, kabar mengenai kemungkinan Lalu Iqbal untuk mencalonkan diri dalam Pilgub NTB telah menjadi perbincangan hangat.

Dia telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh politik, masyarakat, dan agama. Meskipun demikian, Lalu Iqbal belum secara resmi mengkonfirmasi rencananya untuk maju dalam Pilgub NTB, mengklaim bahwa pertemuan tersebut hanya sebatas untuk memberitahukan bahwa tugasnya sebagai Dubes Turki telah selesai.

Paling terkini Lalu Muhammad Iqbal bahkan sudah membuka komunikasi dengan sejumlah partai politik dengan mengunjungi Ketua DPD Demokrat

NTB Indra Jaya Usman (IJU).

“Semua masuk radar. Putra putri terbaik NTB. Sebagai partai politik kita harus banyak mendengar juga aspirasi dari publik, tokoh-tokoh yang punya kemungkinan dan punya kapabilitas,” ungkap IJU.

Namun untuk saat ini, kata IJU, pihaknya masih fokus untuk memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2024. Walaupun di saat bersamaan pembahasan mengenai Pilkada jug sudah dimulai.

“Karena ini tahun-tahun politik pasti ada kesana masalah ke Pileg, Pilpres, berbicara isu-isu lokal daerah, Pilkada pasti kena lah,” kata anggota DPRD Lombok Barat ini.

Adapun inti pertemuan dengan Iqbal di kediamannya itu bicara soal visi pembangunan. Obrolan tentang Pilkada, kata IJU, hanya menjadi guyonan.

“Kita berbicara pembangunan, industrialisasi tepat sasaran dan tepat guna, bagaimana ke depannya itu yang banyak kita diskusikan,” kata IJU.

Sebelumnya, Iqbal pulang kampung ke Praya, Lombok Tengah, Rabu (6/9/2023) usai menunaikan tugasnya sebagai Dubes Indonesia untuk Turki selama 4,5 tahun.

Diplomat lulusan Doktor Politik Universitas Bucharest Rumania ini mengakui didekati sejumlah tokoh politik.

“Tepatnya saya didatangi, dihubungi beberapa Parpol, tokoh masyarakat,” bebernya.

Pendekatan itu karena Iqbal dinilai punya kans untuk bersaing pada Pilgub NTB 2024. Komunikasinya dengan sejumlah Parpol itu belum merujuk pada kepastian Iqbal turun gelanggang di Pilkada 2024.

“Sebaiknya kita menjaga etika politik karena itu yang kita resahkan sekarang,” urainya. ●IRY







# PERTARUNGAN DUA KLAN BEREBut SULBAR SATU

**Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulawesi Barat (Sulbar) yang akan datang dipastikan akan menjadi pertarungan yang semakin menarik.**

Pasalnya, dua klan atau keluarga besar, yaitu keluarga Masdar dan keluarga Mengga, kemungkinan besar akan berpartisipasi dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.

Dua tokoh yang menjadi perwakilan dari kedua klan tersebut adalah Andi Ibrahim Masdar dari Keluarga Masdar dan Salim S Mengga dari Keluarga Mengga.

Kedua figur ini semakin menguatkan niat mereka untuk bertarung dalam Pilgub Sulbar, hal ini terlihat dari bermunculannya baliho dan spanduk mereka yang terpasang di sepanjang jalan.

Baliho-baliho ini menampilkan gambar wajah keduanya beserta slogan-slogan yang menyoroti kemungkinan mereka dipilih oleh rakyat pada Pilkada 2024 mendatang.

Pengamat politik dari Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Ahmad Amiruddin mengungkapkan kedua tokoh politik ini memiliki peluang besar untuk bersaing dalam kontestasi Pilkada mendatang.

Nama mereka masih cukup dikenal di kalangan masyarakat Sulawesi Barat.

“Kedua klan kemungkinan besar akan mencoba untuk tetap menjadi nomor satu jika mereka maju dalam Pilkada mendatang,” ungkapnya.

Namun demikian, jika kedua klan ini berhasil menyatukan kekuatan mereka, dipastikan akan sulit bagi lawan-lawannya untuk mengalahkan mereka karena memiliki basis massa yang cukup besar.

“Jika kedua klan ini berhasil bersatu, saya yakin mereka akan menjadi sangat kuat,” tambahnya.

Namun, jika tidak ada figur lain yang jauh lebih kuat yang mungkin dapat membawa mereka bersatu, maka kedua klan ini kemungkinan besar akan kembali bertarung dalam Pilkada.

Salim S Mengga sendiri adalah seorang Purnawirawan TNI-AD yang pernah menjabat sebagai Kepala Staf Komando Daerah Militer Diponegoro. Selain itu, ia juga pernah terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sulbar.

Sementara itu, Andi Ibrahim Masdar adalah adik kandung dari Gubernur Sulbar, Andi Ali Baal Masdar. Dengan singkatan AIM, Andi Ibrahim telah menjabat sebagai Bupati Polman selama dua periode dan masih menjabat hingga saat ini.

Bahkan AIM telah dengan tegas mengumumkan keputusannya untuk bergabung dengan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan meresmikan niatnya untuk menjadi calon Gubernur Sulbar pada Pilgub tahun 2024 mendatang.

Mantapkan dirinya menuju pencalonan di Pilgub 2024, AIM mengungkapkan keyakinannya dalam mendukung nomor urut 01 di Sulawesi Barat.

Bupati Polewali Mandar yang telah menjabat selama dua periode tersebut menegaskan keanggotaannya di PDIP dengan bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) yang diberikan langsung oleh ketua PDIP, Megawati Soekarno Putri.

AIM menjelaskan bahwa KTA yang diterimanya adalah tanda resmi bergabung dengan partai tersebut, berbeda dengan yang diberikan dengan tanda tangan Sekretaris Jenderal.

Lebih lanjut, AIM optimis bahwa PDIP akan menjadi kendaraan politik yang akan digunakannya untuk mencapai tujuannya di Pilgub 2024.

Namun, ketika ditanya tentang persiapan menuju Pilgub 2024, AIM mengungkapkan bahwa saat ini fokusnya masih pada tugasnya sebagai Bupati Polman. Ia juga menyebut bahwa prioritasnya adalah Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Calon Legislatif (Caleg) yang akan datang.

Selain itu, AIM juga mengumumkan persiapannya untuk menyambut kedatangan Ganjar Pranowo pada bulan Oktober 2023.

Awalnya, kedatangan Ganjar direncanakan pada akhir Juni 2023 untuk acara jalan santai, tetapi AIM menjelaskan bahwa kunjungan

tersebut akan menjadi bagian dari tahap kampanye pada bulan Oktober.

AIM memiliki target ambisius, yakni memperoleh 50 persen suara kemenangan bagi Ganjar dalam Pilpres 2024 mendatang. Dengan keyakinan dan tekadnya yang kuat, AIM siap menghadapi tantangan politik yang ada di Sulawesi Barat.

Sementara nama lain yang juga disebut-sebut bakal maju dalam Pilgub Sulbar 2024 adalah Bupati Mamuju Tengah, Aras Tammauni, yang juga merupakan Bupati dua periode di Kabupaten termuda di Sulawesi Barat, dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk ikut serta dalam Pilgub Sulbar tahun 2024 yang akan datang.

Keputusannya untuk mencalonkan diri dalam Pilgub Sulbar mendatang adalah bukti nyata dari rasa peduli yang mendalam terhadap wilayah Sulawesi Barat secara keseluruhan. Aras Tammauni berkomitmen untuk mendorong Sulbar agar menjadi daerah yang lebih maju daripada sebelumnya.

Dalam pernyataannya yang sangat tegas, Bupati aktif Mamuju Tengah ini mengumumkan niatnya untuk bersaing sebagai calon Gubernur Sulawesi Barat pada Pilgub yang akan datang.

Namun, hingga saat ini, Aras Tammauni belum mengungkapkan siapa yang akan menjadi pasangan duetnya dalam kontestasi Pilgub mendatang.

“Kalau Gubernur disebut, Insya Allah kita gaspol saya optimis untuk maju,” tegas orang nomor satu di Mamuju Tengah ini.

Aras Tammauni menegaskan bahwa persiapannya untuk bersaing dalam Pilgub sudah sangat matang. Berbagai langkah persiapan telah diambil untuk memastikan bahwa ia siap untuk maju dan memiliki potensi untuk meraih kemenangan.

“Yang jelas kita sudah sangat siap untuk maju dan tentunya siap menang,” tandasnya.

Dengan semangat ini, Aras Tammauni siap untuk menghadapi perjuangan politik yang akan datang dalam rangka mewujudkan visi dan misinya untuk kemajuan Sulawesi Barat. • IRY







“Ada beberapa calon kepala daerah bahkan kepala daerah mengarahkan dan menggiring suara PNS untuk memilih salah satu paslon. Di media sosial sudah banyak, bukti nyata”

*Sulaiman Helmi*

# ASN DI SUMSEL MASIH MELAKUKAKAN POLITIK PRAKTIS

**Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI merilis ada 10 provinsi di Indonesia yang rawan akan tingkat netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mendatang.**

Dari website Bawaslu.go.id, 10 provinsi tersebut yakni Provinsi Maluku Utara (Malut), Sulawesi Utara (Sulut), Banten, Sulawesi Selatan (Sulsel), Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur (Kaltim), Jawa Barat (Jabar), Sumatera Utara (Sumut), Gorontalo dan Bandar Lampung.

Bawaslu RI juga merinci ada 20 kabupaten/kota yang tingkat kerawanan netralitas ASN patut diwaspadai. Yakni di Ka-

bupaten Siau Tagulandang Biaro, Kabupaten Wakatobi, Kota Ternate, Kabupaten Sumba Timur, Kota Parepare, Kabupaten Bandung, Kabu-

upaten Jeneponto, dan Kabupaten Mamuju.

Lalu, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Bulukumba, Kabupaten Maros, Kota Tomohon, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Kotamobagu, Kabupaten Kediri, Kabupaten Konawe Utara dan Kabupaten Poso.

Daerah lain yaitu Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Kota Banjarbaru, Kabupaten Dompu, Kabupaten Sigi dan Kabupaten Luwu Timur.

Dari kasus politik uang sendiri, Bawaslu Sumsel menyebut Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur yang paling rawan dengan hasil indeks sekitar 32,2 persen.

Meskipun masuk dalam kategori rawan sedang, namun Bawaslu Sumsel terus mengedukasi masyarakat Sumsel agar tidak mudah diiming-imingi uang oleh peserta pemilu.

Sesuai aturan dalam Pasal 2 UU No 5 Tahun 2014 “Setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu”.

Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatori berkata sudah tugasnya ASN, TNI dan Polri untuk tetap netral dalam berpolitik, terlebih jelang Pemilu 2024 mendatang. Karena hal tersebut menjadi sebuah kewajiban, dengan tidak memihak peserta maupun partai politik yang ikut dalam kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

“Itu memang tugasnya ASN, TNI dan Polri yang harus netral. Kami selaku pimpinan akan ikut memonitoringnya,” ujarnya.

Jika terbukti ada ASN di Sumsel, baik di tingkat kabupaten/kota maupun di Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel yang ketahuan memihak salah satu peserta Pemilu atau partai politik, akan ada tahapan sanksi yang dijalankan.

Mulai dari tahapan sanksi administrasi, teguran ringan, teguran berat dan sanksi lainnya. Namun sejauh ini, dia belum melihat ASN di Sumsel yang tidak netral atau memihak peserta Pemilu 2024 mendatang.

“Sumsel belum ada terlihat, karena memang belum dimulai. Belum ada juga calonnya, jadi tidak bisa disebut netral tidaknya (ASN di Sumsel), karena belum resmi (peserta Pemilu 2024 menyalonkan diri),” ungkapnya.

Pengamat Kebijakan Publik Sulaiman Helmi menilai hingga saat ini masih banyak ASN yang terlibat dalam politik praktis, apalagi mendukung salah satu peserta Pemilu 2024.

Hal tersebut terjadi, karena menurutnya pola rekruitmen yang belum terlalu maksimal. Asesment atau lelang jabatan di

lingkungan pemerintahan juga masih dipolitisasi.

Ketidaknetralan ASN tersebut bukan karena tekanan, karena banyak dari ASN di Sumsel yang masih melakukan politik praktis, agar mendapatkan jabatan yang masih membutuhkan rekomendasi dari kompetisi struktural mereka.

“Kalau saya lihat, mereka masih punya kepentingan dari sisi kebijakan, mau tidak mau harus lakukan itu. Ada beberapa calon kepala daerah bahkan kepala daerah mengarahkan dan menggiring suara PNS untuk memilih salah satu paslon. Di media sosial sudah banyak, bukti nyata bahwa itu sudah ada,” katanya.

Karena itulah dia menilai ASN di Sumsel masih rawan ketidaknetralan, karena netralisir ASN masih belum optimal. Sanksi yang diberlakukan juga belum tegas, sehingga para ASN di Indonesia termasuk di Sumsel masih berani mendukung peserta Pemilu 2024 secara terang-terangan.

Faktor lainnya yang membuat ASN tidak netral dalam menghadapi kontestasi politik di Indonesia yakni, adanya ikatan emosional dengan peserta Pemilu, baik ikatan pekerjaan maupun ikatan keluarga.

Dosen Ilmu Komunikasi Pascasarjana Universitas Bina Darma (UBD) Palembang ini menilai ASN di Sumsel sudah paham tentang wawasan politik. Tapi yang mendorong ASN di Sumsel masih tidak netral, karena mereka diduga mempunyai kepentingan politik masing-masing.

Menurut Ketua Tidar Partai Gerindra Sumsel, Muhammad Ridho, ASN yang loyal ke pimpinannya yang masih menjabat itu merupakan hal yang wajar. Namun yang patut dipertanyakan, jika ASN masih loyal ke pimpinannya yang tidak lagi menjabat.

Caleg DPRD Kota Palembang Dapil 6 Nomor Urut 1 Partai Gerindra Sumsel ini mengatakan, sebagai warga negara dan peserta Pemilu, dia menyayangkan jika ada ASN yang memberikan fasilitas ke mantan pimpinannya dalam mengikuti kontestasi Pemilu 2024 dengan menggunakan dana negara, hal tersebut sangat merugikan masyarakat.

“Kecewa sih kecewa, karena ASN sudah ada peraturannya jika mereka harus netral. Itu tidak adil. Kalau hanya sebatas mendampingi pimpinannya saja yang masih menjabat, itu tidak masalah. Mereka menjalankan sesuai dengan tupoksi masing-masing,” ucapnya. ●IRY





“Tidak bisa kita menggiring mereka dengan cerita fiktif. Kita harus membangun kepercayaan tersebut. Apalagi untuk setiap pejabat politik, pasti dipilih yang pasti. Dikenal, disukai dan dipercaya. Barulah dipilih (di Pilgub 2024)”

*Herman Deru*



# MERANGKUL SUARA DARI MEDIA SOSIAL

**Promosi para calon legislatif (caleg), calon kepala daerah (cakada) hingga calon presiden (capres) kini semakin banyak dilakukan di platform-platform media sosial (medsos), baik di Facebook, Twitter, Instagram, TikTok dan lainnya.**

Selain mudah tersebar di seluruh pengguna internet di Indonesia, penggunaan medsos juga lebih tepat sasaran dan biaya yang terjangkau. Banyak juga para politisi yang menggandeng pengguna akun medsos yang sudah mempunyai pengikut medsos dalam jumlah yang banyak, sehingga publikasi sosok politisi lebih cepat tersebar.

Bahkan beberapa waktu lalu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Selatan (Sumsel) menggelar pertemuan dengan Forum Admin Media Sosial (FAMS) Sumsel yang dihadiri Herman Deru dan Pelaksana tugas (Plt) Wali Kota (Wako) Palembang Ratu Dewa serta puluhan pemilik akun medsos di Sumsel.

Dalam forum tersebut, Herman Deru berkata, media sosial sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi publik, terutama tentang dunia perpolitikan di Indonesia.

“Seorang pejabat harus mengatakan yang benar, tapi tidak semua yang benar harus dikatakan. Jadi tergantung pejabatnya sendiri. Tugas admin medsos berperan untuk mengedukasi ke masyarakat luas,” katanya.

Saat ditanya tentang kehadirannya dalam acara FAMS Sumsel tersebut untuk menyaring suara jelang pencalonannya sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sumsel 2024, Herman Deru menjawab dengan kritis.

Menurutnya, konstituen atau masyarakat akan tetap menilai sosok yang akan dipilihnya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 melalui tiga tahapan, yakni dikenal, disukai dan dipercaya.

“Tidak bisa kita menggiring mereka dengan cerita fiktif. Kita harus membangun kepercayaan tersebut. Apalagi untuk setiap pejabat politik, pasti dipilih yang pasti. Dikenal, disukai dan dipercaya. Barulah dipilih (di Pilgub 2024),” ucapnya.

Ketua Fams Sumsel Ridwan Edo yang juga pemilik akun Instagram Palembang Info mengatakan, pertemuan dengan Gubernur Sumsel Herman Deru hanya sebatas agenda tahunan yang sering di-

gelar selama beberapa tahun terakhir saja.

Dia membantah jika acara FAMS Sumsel tersebut berkaitan dengan langkah Herman Deru untuk meraih suara di Pilgub 2024 mendatang. Karena kegiatan tersebut hanya sebatas silaturahmi, edukasi dan jejaring antar admin medsos saja.

“Jika ada politisi yang ingin menggandeng pengguna medsos, itu kembali ke pemilik medsos masing-masing. Karena anggota FAMS punya akun medsos sendiri dan tergantung kebijakan mereka masing-masing. Tidak menutup kemungkinan mereka menerima atau menolak tawaran kerjasama dari politisi yang ingin dipublikasi,” ujarnya.

Sejauh ini lanjutnya, program kerja (proker) FAMS tidak ada unsur politis dan tidak ada kaitannya dengan proker Pemprov Sumsel atau pejabat di pemerintahan.

Saat ini anggota FAMS Sumsel ada sekitar 75 orang dari 15 kabupaten/kota di Sumsel.

Sementara M Reza Fajri, anggota FAMS Sumsel yang juga pemilik akun Instagram @palembang\_tangkap dengan 15,3 ribu followers mengakui sudah ada beberapa caleg yang ingin mempromosikan diri di akun medsosnya.

Namun saat ini masih terkendala

karena beberapa caleg tersebut masih dalam urutan Daftar Calon Sementara (DCS). Para caleg tersebut masih menunggu hingga keluarnya Daftar Calon Tetap (DCT), barulah akan mendeklarasikan diri di medsosnya.

“Masih terkendala di DCS, karena mereka belum tahu apakah masuk DCT atau tidak. Kalau nanti sudah masuk dalam DCT, mereka baru mau mengiklankan diri di medsos @palembang\_tangkap,” ucapnya.

Untuk patokan harga promosi sosok caleg sendiri, dihargai sekitar Rp100.000 sampai Rp200.000 untuk penayangan foto di feed. Lalu penayangan video caleg dihargai Rp300.000 – Rp500.000 per satu video di feed.

Sedangkan untuk penayangan di snap Instagram hanya dipatok Rp100.000 saja untuk sekali tayang.

Dia tidak pernah membatasi siapa saja untuk mempromosikan diri di akun medsosnya, dari partai mana pun atau sosok caleg siapapun. Dia tidak akan berpihak ke pasangan calon (paslon) siapapun yang akan memasang iklan ke medsosnya.

“Akun medsos saya tidak membatasi mau mendukung siapa, bebas untuk semua. Mereka mau berkampanye, kita siapkan wadahnya untuk siapapun. Kalau beberapa waktu lalu, ada beberapa pejabat yang kerap memasang iklan di medsos saya juga. Siapun bisa,” ujarnya.

Sementara itu, Tun Teja, Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumsel Bidang Informasi Komunikasi Seni Budaya yang juga caleg Kota Palembang Dapil 2 nomor urut 1 sangat memanfaatkan medsos untuk mempromosikan dirinya sendiri.

Tak hanya dirinya, partai pengusungnya pun sangat dekat dengan pasar medsos yang sangat bagus dalam branding ke seluruh lapisan masyarakat. Apalagi pemilihan muda di Pemilu 2024 mendatang mencapai lebih dari 50 persen.

“Kita harus tahu bagaimana memanfaatkan medsos, partai juga mengajak kader-kader khususnya para caleg untuk meleak medsos. Salah satunya dengan memanfaatkan medsos masing-masing. Saya pribadi pun sangat memaksimalkan media sosial pribadi saya untuk promosi sebagai caleg,” katanya.

Pernah mengenyam karir sebagai jurnalis, Tun Teja sangat paham jika medsos bermanfaat untuk penyebaran informasi hingga ke pelosok daerah. Selain mudah mengenai ke masyarakat, juga biaya yang dikeluarkan sangat murah. Dibandingkan dengan hanya mengandalkan pemasangan poster-poster di pinggir jalan atau di pohon-pohon, kekuatan medsos tentunya lebih efisien dan tepat sasaran.

Jika para caleg tidak punya bakat atau gagap teknologi, bisa memanfaatkan konsultan digital atau akun-akun medsos yang banyak followersnya. Dengan menggunakan kekuatan digital, sangat mudah bagi para caleg untuk mempromosikan diri hingga ke berbagai kalangan masyarakat.

“Saya banyak kenal dengan influencer di Sumsel, jadi saya sering dibantu mereka,

dengan nge-repost video saya ke akun mereka. Dampaknya sangat besar, penontonnya hingga ribuan bahkan menambah banyak followers medsos saya juga,” ujarnya.

Diakuiinya, awalnya Tun Teja menutup sosial medianya untuk masyarakat luas, hanya

membatasi informasi-informasi yang dipostingnya ke orang-orang terdekatnya saja. Tapi saat ini, dia menjadi lebih peka tentang pentingnya berjejaring media sosial saat ini. •RDR







“Ada juga pemilih emosional yang berlatar belakang kelompok identitas, suku, agama, keluarga, pertemanan atau suatu kelompok yang berinteraksi dan terhubung”

Ahmad Marzuki

# MEMAHAMI KOMUNIKASI POLITIK DI MASYARAKAT

**Ada ragam komunikasi politik yang dilakukan menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dibutuhkan para calon di kontestasi Pemilu, untuk mempromosikan dirinya ke masyarakat. Kemudian ada banyak pula cara penyampaian yang dilakukan, agar masyarakat bisa tertarik untuk memberikan suaranya saat pencoblosan mendatang.**

Seperti di tingkat Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 mendatang, para caleg harus lebih peka dalam menjalani komunikasi politik ke masyarakat. Apalagi harus bertemu langsung dengan masyarakat, cara penyampaiannya juga harus mengena ke berbagai kalangan di lapisan masyarakat.

Komunikasi politik yang tepat sasaran coba dilakukan Farlin Saputra (41), caleg Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil 1 Palembang Nomor Urut 8 yang meliputi Kecamatan Ilir Barat (IB) 1, IB 2, Bukit Kecil dan Gandus Palembang.

Selama ini, dia membangun komunikasi politik dengan memperhatikan kawasan dan aktivitas masyarakat sekitar. Seperti saat dia turun di kawasan 28 Ilir Palembang, banyak warganya yang berprofesi sebagai buruh dan tukang bangunan.

“Kita melihat masyarakat yang profesinya buruh dan tukang bangunan, kita lihat kebutuhan dan aspirasi mereka. Seandainya saya jadi, kita akan memberdayakan mereka sesuai dengan kebutuhan warga di sana,” ucapnya.

Sama halnya ketika dia datang ke 30 Ilir Palembang, banyak ibu-ibu di sana yang menjalani Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), terlebih saat bulan Ramadhan sering berjualan. Dari komunikasi tersebut, ternyata pelaku UMKM tersebut membutuhkan bantuan modal untuk mengembangkan usahanya.

Berbeda di kawasan elit seperti di Jalan Demang Lebar Daun Palembang, dia melakukan pola komunikasi politik dengan cara lain. Kendati tidak membutuhkan bantuan pendanaan, tapi warga hanya meminta peningkatan fasilitas keamanan saja.

Selama melakukan sosialisasi ke masyarakat, Farlin Saputra dibantu anggota timnya yang berjumlah 100 orang.

Dia juga tak jarang turun langsung ke lapangan melakukan kunjungan hingga door to door.

Namun jika tidak bisa, tim suk-

sesnya yang turun ke lapangan.

“Sebenarnya tergantung salesman (tim) sendiri. Caleg ini adalah produk, salesnya bagaimana caranya agar caleg laku di masyarakat. Tim-tim yang disebar juga harus yang disukai orang-orang, sehingga mudah membaur ke masyarakat. Komunikasinya juga harus disesuaikan dengan karakter masyarakat itu sendiri,” katanya.

Sejauh ini kehadirannya dan tim suksesnya mendapat respon positif dari masyarakat. Bahkan dia menjamin apa yang sudah disampaikan ke masyarakat, akan dia buktikan saat sudah menjabat jadi anggota DPRD Palembang nantinya.

Saat melakukan komunikasi politik, dia mengklaim tidak pernah menjanjikan hal-hal yang tidak bisa dilakukan anggota dewan. Seperti program-program langsung dari wakil rakyat untuk masyarakat.

## Jaring Generasi Z

Terkait hal ini, pengamat komunikasi politik Rahma Santhi Zinaida mengatakan, media memberikan peran penting dalam pencitraan seseorang yang akan maju di Pemilu 2024 mendatang, apalagi medsos adalah platform murah meriah untuk promosi personal.

Di era teknologi yang canggih, menyentuh masyarakat haruslah menggunakan trik komunikasi politik yang kekinian.

Saat ini pemilih terutama dari kalangan Generasi Z tidak akan tertarik dengan poster-poster caleg/cakada/capres yang fotonya terlihat formal, rapi dan terlihat terlalu cantik atau tampan bak artis ataupun model.

Malah masyarakat kini lebih tertarik

dengan tampilan kekinian, apa adanya dan bergaya santai bak anak muda, mulai dari pakai sneakers, topi dan gaya yang casual. Generasi Z tidak mau lagi dipusingkan dengan poster-poster sosok yang terlihat sekali pencitraan dan sok manis, itu terlihat palsu atau fake.

“Yang apa adanya yang paling disukai masyarakat sekarang, apa yang disampaikan juga tidak berlebihan, itulah yang diinginkan oleh generasi Z,” ujarnya.

Terkait dengan banyaknya info miring yang menyerang caleg, cakada maupun capres, tapi masyarakat Indonesia yang awalnya mudah percaya, akan mudah lupa dengan informasi tersebut.

Apalagi di kancah perpolitikan di Indonesia, tidak berlaku cinta pertama, tapi lebih ke cinta terakhir. Ketika survei dilakukan jauh sebelum Pemilu, mungkin masyarakat akan memilih sosok yang dia suka.

“Tapi jika mendekati pemilihan, sudah ada benih-benih ‘cinta’ dari sosok yang baru dia kenal jelang Pemilu. Sehingga (keputusan memilih) memang susah ditebak tapi mudah dibaca,” ujarnya.

Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Bina Darma (UBD) Palembang ini juga menyikapi tren money politic yang masih menjadi pilihan komunikasi politik para caleg/cakada dan capres di Palembang Sumsel.

Dia berujar, karakteris-

tik penduduk menjadi sangat penting dalam memetakan ampuh tidaknya money politic dilakukan ke masyarakat. Dimana warga Palembang sudah banyak yang open minded terhadap wawasan politik, sehingga tidak akan berpengaruh besar terhadap tawaran money politic atau juga yang disebut ‘Serangan Fajar’.

“Namun di kawasan pegunungan atau pedalaman dengan tingkat ekonomi yang sulit, money politic lebih banyak, suka tidak suka memang itulah yang terjadi. Ini jadi tugas kita untuk mengarahkan politik Indonesia menjadi seperti apa. Tapi saat ini sudah banyak penggiat politik yang banyak menggaungkan tolak money politic,” ujarnya.

## 3 Karakter Pemilih

Penasehat Barikade 98 Palembang Ahmad Marzuki menilai, jelang Pemilu 2024 mendatang banyak caleg yang melakukan promosi diri untuk mendapatkan popularitas dan elektabilitas dengan menggunakan baliho, medsos dan perangkat lainnya yang cukup efektif.

Namun dalam perspektifnya sebagai pemilih, masyarakat kini dikategorikan dengan tiga karakter, yakni pemilih transaksional, pemilih emosional dan pemilih rasional.

Pemilih transaksional di Palembang memang rentan terhadap money politic atau iming-iming janji dari caleg dan persentasenya masih cukup besar.

Tapi ada juga pemilih rasional yang merupakan masyarakat intelektual yang berasal dari lingkungan elit atau kalangan masyarakat menengah ke atas. Mereka melihat sosok caleg/cakada/capres dari latar belakang, visi misi dan ideologi partai pengusungnya.

“Ada juga pemilih emosional yang berlatar belakang kelompok identitas, suku, agama, keluarga, pertemanan atau suatu kelompok yang berinteraksi dan terhubung, seperti dari Suku Jawa, Agama Islam, Nasrani, Etnis Tionghoa dan lainnya,” katanya.

Di Pemilu 2024 mendatang, aktivis ini menilai masih sama seperti Pemilu di beberapa tahun yang lalu. Di mana, masyarakat masih berwawasan politik yang rendah dan masih didominasi oleh pemilih transaksional.

Pemilih transaksional hanya melihat dari apa yang dibawa oleh caleg/cakada/capres ke mereka, tanpa melihat latar belakang sosok tersebut. Tak hanya uang saja, pemilih transaksional juga menerima pemberian dalam bentuk barang.

“Kalau saya perkiraan, pemilih transaksional masih di atas 50 persen. Tapi saya berharap banyak kelompok yang paham berdemokrasi bisa memberikan edukasi ke masyarakat yang aktif dan pasif dalam memahami politik di Indonesia,” ujarnya. ●RDR





“Kalau capres sendiri yang mengedukasi ke masyarakat, itu tidak efektif. Harus ada tim khusus yang turun ke lapangan menjadi penawarnya, jika informasi yang tersebar itu tidak benar”

Iwan Setiawan



# RAGAM GEMPURAN HOAKS JELANG PEMILU

**Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) di tahun 2024 diprediksi akan semakin banyak gempuran ujaran kebencian dan konten hoaks atau konten bohong yang menyerang calon legislatif (caleg), calon kepala daerah (caleg) hingga calon presiden (capres) di Indonesia.**

Apalagi setiap lima tahun jelang Pemilu, konten ujaran kebencian dan hoaks selalu menyebar di berbagai media sosial (medsos), seperti di Facebook dan Twitter. Terlebih saat ini, kian masif penggunaan aplikasi medsos lainnya, yakni TikTok yang sudah banyak digunakan masyarakat Indonesia.

Nila Ertina FM, Penggiat Cek Fakta Sumatera Selatan (Sumsel) sekaligus Trainer Cek Fakta Google News Inisiatif mengatakan, sudah sejak satu tahun ini sudah banyak menyebar konten ujaran kebencian dan hoaks yang menyerang ketiga capres, yakni Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto.

Namun belum terlihat konten ujaran kebencian dan hoaks yang menasar ke para caleg, terutama di Sumsel. Kemungkinan karena para caleg tidak sepopuler ketiga capres, yang akan dipilih oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Dari data turnbackhoak.id, dari Januari hingga Agustus 2023 lalu, tercatat sebanyak 1.561 konten hoaks, 50,03 persen di antaranya adalah political hoaxes atau konten bohong yang berkaitan dengan politik dan orang-orang yang berkontestasi dalam perpolitikan Indonesia.

Konten hoaks yang menyeret nama Prabowo Subianto membahas tentang sosok Menteri Pertahanan (Menhan) ini berkepribadian arogan, seorang penculik dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Konten ujaran kebencian dan hoaks juga menyerang mantan Gubernur DKI Jakarta Anies

Baswedan. Seperti konten jika Anies Baswedan melakukan dugaan korupsi, penipuan hingga berbuat radikal dan anti orang-orang non-Islam.

Mantan Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo juga tak luput dari serangan konten hoaks. Ganjar disebut sebagai petugas partai, melakukan perusakan lingkungan di Rembang dan Wadas serta selalu melakukan pencitraan untuk menaikkan popularitasnya.

“Khusus di Kota Palembang, baru-baru ini ada informasi hoaks yang beredar. Yakni video dengan narasi kader PSI di Palembang ramai-ramai mengundurkan diri setelah kunjungan Prabowo Subianto.

Setelah diklarifikasi langsung oleh akun medsos @psi\_id, video yang beredar tersebut adalah video lama dan pemecatan terhadap oknum pengurus PSI yang meminta mahar pada bacaleg,” ujarnya.

Nila berujar, yang paling mudah terpapar itu adalah pengguna Facebook. Karena bukan dari kalangan anak muda yang sering berjejaring digital. Terutama orang-orang yang sangat fanatik, seperti fanatik agama, fanatik dengan salah satu capres, pasti akan mudah terpedaya dengan konten yang menyerang pihak lawan.

“Kalau orang fanatik dengan Prabowo Subianto lihat isu hoaks Anies Baswedan, pasti percaya tanpa melakukan pengecekan lagi. Biasanya menyerang dari konten isu SARA sengaja dibuat dan dipublikasikan ke masyarakat,” ungkapnya.

Sumsel sendiri berada di urutan ke-8 sebagai pengguna terbanyak internet di Indonesia. Bahkan dari 8,6 jutaan penduduk di Sumsel per 2022, sekitar 72 persen warganya menggunakan internet. Walaupun sekitar 18 persen tidak menggunakan internet, namun mereka juga berpotensi terpapar konten hoaks yang disampaikan dari mulut ke mulut.

Dia berharap masyarakat yang menerima informasi dari medsos, harus mengunjungi laman-laman terpercaya seperti website Komisi Pemilihan Umum (KPU), website cek fakta hingga media mainstream serta jangan mudah percaya tanpa mencari tahu kebenarannya.

“Kita punya program namanya ‘Bibik Lawan Hoaks’ untuk mengedukasi masyarakat agar tidak percaya dengan berita hoaks, terutama jelang Pemilu 2024. Saat ini kita sedang melakukan riset di 440 desa di Kabupaten Banyuasin untuk cek fakta terkait Pemilu,” ujarnya.

## Awasi Isu SARA

Agung Wijaya, caleg DPD RI Dapil Sumsel menyikapi banyaknya penyebaran konten-konten hoaks jelang Pemilu yang perlu diwaspadai dengan menguatnya politik identitas yang juga sering membawa isu suku, agama, rasn dan antar golongan (SARA).

Apalagi Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan, yang seharusnya saling menyatukan, bukan untuk memecah-belah persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia.

“Jika ada konten hoaks yang menyerang saya secara pribadi, saya tidak perlu mengomentari terlalu panjang, cukup didiamkan saja. Tapi jika sudah melewati batas, akan kita tempuh dengan jalur hukum, sesuai dengan delik aduan Undang-Undang (UU) ITE,” ujarnya.

Menurutnya, kunci dari keberlangsungan Pemilu tanpa adanya konten hoaks, harus berawal dari kerelaan hati para kandidat sendiri untuk tetap memegang prinsip komunikasi politik yang santun dan bijak.

Maraknya konten hoaks, ujaran kebencian atau black campaign ditanggapi juga oleh Wakil Ketua (Waka) Masyarakat Bersatu (Mabes) Sumsel Iwan Setiawan, yang dinilainya merupakan hal yang wajar terjadi setiap Pemilu.

Jika konten hoaks atau ujaran kebencian itu tidak benar, para capres tidak perlu menanggapinya atau melakukan klarifikasi. Karena semakin tinggi intervensi dari konten bohong tersebut, akan menggambarkan bahwa isi informasi itu benar adanya. Apabila

konten tersebut benar-benar meresahkan dan sudah menyebar ke masyarakat luas, cukup timnya yang turun ke lapangan untuk mengedukasi masyarakat tentang kebenaran.

“Kalau capres sendiri yang mengedukasi ke masyarakat, itu tidak efektif. Harus ada tim khusus yang turun ke lapangan menjadi penawarnya, jika informasi yang tersebar itu tidak benar. Nanti akan redup sendiri konten-konten negatif tersebut,” ujarnya.

Konten hoaks dan ujaran kebencian juga bisa menyerang para caleg di berbagai daerah, termasuk di Sumsel sendiri. Dia menilai, tidak ada caleg di Indonesia ini yang sengaja melakukan black campaign untuk menjatuhkan caleg lainnya.

Namun jika itu terjadi, kemungkinan dilakukan oleh oknum-oknum dari tim suksesnya, yang ingin memenangkan caleg itu di mata masyarakat, dengan cara menjelekkan caleg pesaing lainnya.

Padahal antara caleg-calegnya sendiri, tidak pernah bersinggungan dan sering bertemu tanpa membahas soal politik. Namun dari arus bawah tim suksesnya yang ricuh sehingga terkesan ada perpecahan antar-caleg itu sendiri.

“Hoaks dan ujaran kebencian terjadi karena ketatnya persaingan, apalagi jumlah kursi di caleg terbatas, jadi persaingan terlalu over. Kemungkinan tim suksesnya yang mencari ide untuk mempromosikan caleg yang diusungnya, dengan agar laku di pasaran dengan cara menjelekkan caleg pesaing lainnya,” katanya.

Bahkan tak jarang ada kericuhan yang terjadi, karena poster caleg dicopot dan diganti dengan poster caleg lainnya. Sebenarnya kejadian tersebut biasanya tidak diinstruksikan oleh calegnya, namun inisiatif dari tim sukses caleg itu sendiri.

“Padahal saat Pemilu, para caleg santai saja ketemu dan ngobrol bareng. Di bawah ini yang sering ribut. Itulah yang seharusnya dihindarkan, agar tidak terjadi perpecahan dan kerusuhan karena persaingan para caleg,” ungkapnya.

●RDR







“Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah itu cukup berpengaruh karena mereka sangat masuk ke dalam sendi-sendi tubuh masyarakat Indonesia”

Febrian

INFO  
DAPIL

Minggu II • Oktober 2023

15

# JAGA INDEPENDENSI DEMI NKRI

**Organisasi berbasis agama menjadi salah satu ladang potensial untuk mendulang suara di Pemilu 2024 ini sehingga tak salah para kadernya juga menjadi rebutan para elit politik Indonesia.**

Demokrasi politik Indonesia sendiri tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan basis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Dimana banyak elit politik tanah air juga berasal dari ketiga lembaga ini.

Meski basis massa mereka menjadi rebutan namun para elit ormas ini lebih memilih ‘jalur aman’ dengan tidak memihak kemanapun demi menjaga keutuhan demokrasi. Hanya saja mereka ada dimana-mana.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Nahdlatul Ulama (NU) Pimpinan Cabang (PCNU) Palembang Abdul Malik Syafei mengungkapkan pandangan organisasi terhadap Pemilu 2024 adalah untuk tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“NU adalah organisasi Islam terbesar di dunia, 10 juta umat Islam di Indonesia berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama. Pandangan politik kita menjadi jelas yaitu menjaga persatuan NKRI berlangsungnya Pemilu 2024 tetap aman dan damai,” kata dia.

Meski adanya deklarasi kader NU Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi calon presiden (capres) Anies Baswedan di Pemilu 2024 tidak akan membuat pandangan NU berubah.

NU menyebutkan kader tetaplah kader dan bertarung dalam dunia politik sudah menjadi urusan pribadi dan partai yang bersangkutan. Sehingga bukan urusan NU.

“NU organisasi yang menciptakan bangsa para perjuangan k y a i

dan para ulama bahkan telah melahirkan Indonesia. Kalau NU mendukung cawapres dan capres terlalu kecil karena tadi NU yang menciptakan bangsa ini,” jelasnya.

Dilanjutkannya sikap NU dalam Pemilu 2024 sudah tegas berdasarkan arahan dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sejak dahulu kalapun organisasi selalu bersikap independen di setiap kali Pemilu.

Sikap lain NU juga tidak mengarahkan kadernya untuk memilih kader dari NU. Semua itu menjadi sikap pribadi karena organisasi tidak memberikan perintah untuk mendukung dan bersikap.

“Sikap NU dalam Pemilu 2024 jelas independen dan tetap menjadi garda terdepan menjaga NKRI. NU tidak kemana-mana tapi NU ada dimana-mana,” tegas dia.

## Kader Berpolitik Tidak Masalah

Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sumatera Selatan (Sumsel) Ridwan Hayatuddin menuturkan sebenarnya maksud Pemilu 2024 untuk konsolidasi politik dalam pergantian jabatan presiden, DPR, DPD dan DPRD. Namun ada beberapa pelaku politik yang tidak bisa menahan diri sehingga dapat mengancam perpecahan negara.

“Adanya organisasi Islam terbesar seperti Muhammadiyah, NU dan ormas lain harus dapat menahan untuk tidak ikut berpolitik praktis. Namun kedua organisasi Muham-

madiyah dan NU, harus memfungsikan dirinya sebagai pengamat dan memberikan

rekomendasi agar NKRI ini terjaga dengan baik,” kata dia.

Partai Islam terbesar di Indonesia disebutkannya bukan hanya harus memiliki pandangan jelas di Pemilu 2024, namun juga sadar peran mereka sangat penting.

Dimana Muhammadiyah, NU dan partai Islam lainnya menjadi kontrol sosial untuk mencegah indikasi konflik politik yang akan memecah belah NKRI.

Adanya para kader Muhammadiyah yang ikut terlibat dalam politik dinilainya biasa saja. Kondisi itu dalam arti tidak melibatkan organisasi Muhammadiyah karena secara formal tidak berpolitik.

“Kita tidak mendukung teman-teman yang berpolitik. Organisasi Muhammadiyah baru akan turun gunung berpolitik apabila negara ini sudah sangat gawat. Mungkin itu juga sama yang akan dilakukan oleh NU. Artinya kita mendukung kader untuk ikut berpolitik tetapi Muhammadiyah tetap independen secara pribadi silahkan,” jelasnya.

Dia mengimbau kepada masyarakat Muhammadiyah di Sumsel dipersilahkan untuk berpolitik dan menentukan hak suara di Pemilu 2024. Namun Muhammadiyah memperhatikan kader yang berpolitik melakukan curang, dusta dan bohong.

“Masyarakat Muhammadiyah yang memilih jangan golput, kalau mereka tidak menyalurkan haknya itu dosa karena sama saja mempersilahkan orang-orang yang tidak layak menjadi pemimpin,” tuturnya.

Sikap yang sama juga disampaikan Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Palembang Chandra yang menjelaskan kalah arah politik mereka juga

berpatokan kepada independen.

“Secara kelembagaan pandangan kami di Pemilu 2024 jelas kami harus independen. Tidak boleh ada kader HMI mendukung para calon di Pemilu 2024 nanti,” terangnya.

Diakuinya HMI ikut berperan serta bersama Bawaslu memantau jalannya Pemilu 2024. Kondisi itu biasanya mereka akan melihat apakah ada kecurangan yang terjadi.

“Bahkan di Pemilu sebelumnya kami menemukan kecurangan dan mengajukannya ke KPU dan menggelar aksi untuk diproses. Akhirnya selesai yang melakukan kecurangan Pemilu diproses,” tuturnya.

Adanya kader HMI di pusat Anies Baswedan maju calon presiden (capres) Pilpres 2024, Chandra juga tidak memberikan arahan kepada anggotanya untuk mendukungnya.

Dijabarkannya HMI adalah himpunan mahasiswa yang jelas tidak akan berhubungan dengan politik praktis. HMI tidak akan berubah padangan menjadi independen dan mendukung alumni dari HMI ini.

“Kalau kami tetap tidak boleh karena kita HMI terkecuali Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) karena mereka sudah alumni diperbolehkan oleh kelembagaan untuk berpolitik. Kalau kita HMI tetap tegas independen,” paparnya.

Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Febrian menanggapi organisasi Islam terbesar seperti Muhammadiyah, NU, HMI dan ormas lainnya memiliki peran sangat penting.

“Organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah itu cukup berpengaruh karena mereka sangat masuk ke dalam sendi-sendi tubuh masyarakat Indonesia. Harus berperan aktif di Pemilu 2024 bukan berarti aktif secara full,” jelasnya.

Dijabarkannya berperan aktif tidak secara full itu organisasi Islam sebagai wadah untuk melakukan seleksi kepada para calon di Pemilu 2024. Seleksi itu bisa apapun untuk menjaga standar kesatuan dan persatuan yang diharap oleh organisasi Islam tersebut.

“Konsep NU dan Muhammadiyah di politik itu harus netral karena mereka yang menjaga persatuan NKRI. Namun mereka juga bisa terlibat ikut dalam melakukan seleksi sebab organisasi ini pastinya memiliki paham tentang calon mana yang layak untuk persatuan Indonesia,” terangnya.

Febrian juga merespon apabila ada kader di salah satu organisasi menjadi calon presiden ataupun lainnya itu boleh saja.

Dia melihat larangan untuk menjadi calon itu hanya ada untuk ASN bukan untuk kader ormas Islam.

“Terpenting itu bagaimana kebijakan di organisasi masing-masing saja. Lebih utama peran ormas Islam di Pemilu 2024 harus tetap ada karena bisa menjadi kontrol apabila ada perpecahan dan konflik di dalam prosesnya nanti,” pungkasnya..

•RDR





“Itulah yang saya alami, benar-benar sangat prihatin. Artinya pemilih itu belum menentukan pilihan sebelum mendapatkan sesuatu”



*Khalisah Hayatuddin*

# SUARA SWING VOTERS DIPREDIKSI MENINGKAT PESAT

**Suara swing voters yang dianalogikan dengan suara mengambang atau undecided voters diprediksikan meningkat pesat hingga menembus 90 persen pada Pemilu 2024 nanti. Kondisi itu dikhawatirkan para calon legislatif (Caleg).**

A da beberapa hal menyebabkan suara arah angin ini meningkat tajam diantaranya pendidikan politik yang minim dari pemerintah, elit politik dan partai ke masyarakat. Mereka kini dibiasakan dengan sistem instan yang merusak nilai-nilai tulus demokrasi itu sendiri.

Budaya money politic atau politik uang ini seperti sulit lepas di sistem demokrasi Indonesia karena semua ikut terlibat. Hal itu juga disadari para politisi sendiri meski penafsiran mereka juga berbeda-beda.

Caleg DPRD Sumsel Partai PPP Khalisah Hayatuddin mengakui, pemilih swing voters dipastikan naik tinggi di Pemilu 2024, disebabkan meningkatnya pemilih baru yang akan menentukan hak pilihnya saat mendapat keuntungan secara pribadi.

“Saya yakin Pemilu 2024 banyak sekali karena saya merasakan-nya sendiri,” kata Caleg Dapil Sumsel 8, Musi Rawas, Lubuk Linggau dan Muratara nomor urut 1 ini.

Menurutnya pemilih yang menentukan suaranya dengan cara swing voters memi-

liki dampak kepada Indonesia kedepannya. Tentunya hanya mendapatkan paket sembako dan amplop, tidak bisa memilih pemimpin yang berdampak positif bagi masyarakat secara luas nanti.

“Saya akan berikan edukasi kepada konstituen untuk menentukan suaranya dengan benar. Suara masyarakat sangat penting untuk menentukan nasib bangsa Indonesia,” ucap Dosen Pasca Sarjana (S2) Fakultas Hukum (FH) Universitas Muhammadiyah Palembang (UMP) ini.

Secara pribadi Khalisah prihatin karena suara swing voters pasti masih terus ada khususnya di Pemilu 2024 nanti. Diakuinya dia menjadi Caleg agar bisa masuk ke jajaran penting pemerintah bisa menentukan kebijakan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

“Ikut caleg beranjak dari keprihatinan nasib masyarakat. Makanya saya ingin untuk ikut andil menentukan kebijakan negara regulasi, sebab dibuat oleh anggota dewan,” kata dia.

Dia juga pernah secara spontan ditembak atau ditanya langsung para pemilih yang berkata kalau dia terpilih apakah ingat dengan mereka. Sementara mereka juga beranggapan para caleg terpilih juga pasti melupakannya.

Sehingga tidak ada alasan lain mereka juga perlu mendapatkan sesuatu dan hal ini seperti sebuah muslihat untuk saling

memanfaatkan satu sama lain.

“Itulah yang saya alami, benar-benar sangat prihatin. Artinya pemilih itu belum menentukan pilihan sebelum mendapatkan sesuatu,” ungkapanya.

Diakui Khalisah, di Pileg 2024 ini tentu dia telah mempersiapkan biaya mulai dari operasional kampanye, membentuk tim pemenangan yang diisi oleh keluarga sendiri untuk menekan biaya, mencetak baju kaos serta banner.

Dia tidak akan menggunakan biaya seperti membeli sembako atau menerapkan politik uang demi menggaet suara swing voters.

“Biaya operasional kampanye kurang lebih saya sudah persiapkan Rp200 juta tidak ada beli sembako dan sebagainya,” pungkasnya

Sementara caleg DPRD Palembang dari Partai Gerindra Mahmud Ahmad mengatakan, dia juga sudah memprediksi swing voters pastinya sangat banyak di Pemilu 2024. Tetapi dia tetap tidak gentar terus maju untuk mengabdikan diri kepada masyarakat apabila terpilih.

“Kondisi ekonomi semakin susah beras semakin mahal pastinya banyak suara swing voters. Terlebih lagi mau memilih kalau dikasih sembako dan sebagainya. Kalau saya apa adanya saja kalau dipercaya oleh masyarakat alhamdulillah. Tentukan kalau tidak terpilih karena jadi suara swing voters lebih banyak mau diapakan,” kata

Caleg Dapil 4 Sako, Sematang Borang dan Kalidoni nomor urut 5 ini.

Menurutnya pastinya ada saja Caleg yang sudah mempersiapkan sembako dan sebagainya untuk menggaet suara dari swing voters. Namun dia hanya mempersiapkan kebutuhan kampanye sesuai dengan aturannya yaitu biaya kebutuhan membuat alat kampanye.

“Untuk biaya operasional kampanye saja saya sudah siapkan Rp100 juta sampai Rp150 juta. Tentu saya mencalonkan diri karena merasa terpanggil untuk ikut memperhatikan masyarakat kedepannya. Jadi saya akan mencalonkan diri apa adanya saya saja. Semoga masyarakat bisa menentukan pilihan secara bijaksana,” paparnya

Pengamat Politik Sumatera Selatan Ade Indra Chaniago menanggapi berdasarkan analisisnya suara swing voters bersifat pragmatis meningkat hingga 95 persen.

Menurutnya swing voters pada hakekatnya adalah pemilih yang memilih apabila diberikan sesuatu.

“Banyak sekali nantinya suara yang masih belum bulat atau labil di Pemilu 2024 nanti terlebih lagi swing voters. Kondisi ekonomi semakin susah dengan pola politik sembako dan politik uang diterapkan sebelumnya akan berdampak kepada Pemilu 2024. Kalau saya perkiraan ada kenaikan sampai 95 persen suara swing voters,” jelasnya.

Suara swing voters menurutnya susah sengaja diciptakan oleh rezim incumbent telah berkuasa terlebih dahulu dan mempersiapkan jaring serta uang yang cukup. Dampaknya akan terjadi Login elektoral politik atau pemenang sudah ditentukan.

“Ini sudah dipelihara oleh Parpol itu sendiri khususnya yang sudah menjabat atau incumbent. Jadi susah kalau suara swing voters itu bisa hilang bahkan meningkat di Pemilu 2024 nanti,” jelasnya.

Pemilu 2024 adalah pesta rakyat yang disinyalir dijadikan masyarakat untuk mendapatkan sesuatu karena sudah diajarkan oleh Parpol tertentu yang ingin memenangkan kompetisi dengan cara menggunakan kekuatan uang. Jadi sudah menggar kepada masyarakat sehingga sulit untuk dilepaskan.

“Tugasnya Parpol itu sendiri dan para dosen untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tetapi kebanyakan Parpol menjadi masyarakat itu massa bukan kader mereka. Sebab pendidikan politik Parpol hanya berikan kepada kadernya bulan kepada masyarakat,” ungkapanya.

Menurutnya pemilih juga ada yang bersifat tradisional memilih berdasarkan suku dan pemilih rasional yang lebih cerdas menentukan pemimpin dengan melihat program calon pemimpin yang dipilihnya.

“Intinya masyarakat harus lebih cerdas dalam menentukan pemimpin bangsa baik di Pilpres dan pemilihan lainnya,” pungkasnya. ●RDR







“Tetapi ini belum final, tentu saja kita masih menunggu hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh parpol di masa pencermatan rancangan DCT”

**Hendri Daya Putra**

# BAKAL CALEG TERSANGKA MASIH MASUK DCT SUMSEL

**Peralihan Daftar Calon Sementara (DCS) ke Daftar Calon Tetap (DCT) segera dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Beberapa Bacaleg yang masih berstatus tersangka masih dibolehkan masuk DCT karena status hukumnya masih belum ada ketetapan.**

**H**al ini terjadi pada dua tersangka kasus korupsi di Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sumatera Selatan yakni Suparman Romans dari Partai Perindo dan Akhmad Tahir dari Partai Nasdem.

Amrah Muslimin, Ketua KPU Sumsel menjelaskan, hingga hari terakhir tanggal 3 Oktober 2023 pukul 23.59 WIB menjadi waktu final bagi partai politik melakukan penyerahan pencermatan DCT sekaligus melakukan pergantian Bacaleg.

Namun sampai batas waktu yang ditentukan tidak terlalu banyak perubahan baik itu nomor urut maupun dengan penggantian termasuk dua nama itu masih tertera sebagai Bacaleg.

“Untuk melakukan penggantian itu memang syaratnya berat karena harus rekomendasi dari ketua umum atau sekjen DPP. Nah setelah ini kita baru mempersiapkan penetapan DCT yang akan kita tetapkan pada tanggal 3 November 2023,” tegas Amrah.

Selain hampir tidak ada perubahan, belum juga ada laporan ke KPU Sumsel terkait Bacaleg yang wafat atau lainnya.

“Sedangkan untuk tersangka sebelum putusan final atau inkrah dia tetap calon legislatif meski telah ditetapkan tersangka karena tersangka belum tentu salah atau benarkan. Harus melalui proses persidangan sampai proses peradilan itu bersifat Inkrah,” jelasnya.

Amrah mengung-

kapkan peralihan Bacaleg dari DCS ke DCT hampir tidak ada perubahan. Namun perubahan malah di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atas nama Bursah Zarnubi yang mundur karena mengajukan menjadi Caleg untuk DPRD Jambi.

“Kalau di Sumatera Selatan ini Alhamdulillah cukup baik, karena komunikasi kami dengan partai politik cukup baik jadi sampai hari ini tidak ada kendala berarti. Untuk ratusan Bacaleg yang kami coret beberapa waktu lalu karena tidak memenuhi syarat dan tidak ada salah satu pun partai politik yang protes terhadap putusan kami,” tegasnya.

Sementara terkait banyaknya spanduk yang bertebaran di masa DCS ini, Amrah Muslimin menilai hal itu belum masuk ranah pelanggaran. Sehingga mereka tidak akan memberikan tindakan apapun bagi Bacaleg untuk bersosialisasi.

“Artinya ketika kita bicara ini melanggar atau belum, siapa yang melanggar, tidak ada yang melanggar karena mereka baru bakal calon legislatif. Jadi yang nempel Baliho itu belum ditetapkan KPU sebagai peserta pemilu, bagaimana KPU atau Bawaslu mau menindak pelanggaran itu,” terangnya.

Namun setelah tanggal 28 November baru berlaku aturan-aturan tersebut dan dilakukan penindakan seperti dicabut Baliho, diterbitkan. Sedangkan untuk sekarang ranahnya pemerintah daerah melalui perda penertiban.

Sementara anggota KPU Sumsel Divisi Teknis

Penyelenggara, Hendri Daya Putra menambahkan, pada tanggal 4 Oktober sampai 18 Oktober 2023 KPU Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan tahapan verifikasi administrasi terhadap dokumen persyaratan bakal calon yang dilakukan penggantian oleh partai politik.

Kemudian akan dilakukan rekapitulasi terhadap hasil verifikasi administrasi dari tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan 23 Oktober 2023.

“Dimasa itulah KPU Provinsi Sumatera Selatan dan KPU kabupaten/kota akan mengetahui rincian jumlah partai politik dan jumlah bakal calon anggota legislatif yang dilakukan pergantian atau yang melakukan perpindahan dapil atau mungkin ada yang meninggal dunia, jadi jadwalnya dari tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2023,” jelas Hendri.

Hendri menjelaskan jumlah Bacaleg yang masuk DCS KPU Sumsel berjumlah 1089 orang dan kemudian juga ditambah dari seluruh dari 17 Kabupaten/Kota dengan total mencapai 9.206 orang.

“Tetapi ini belum final, tentu saja kita masih menunggu hasil verifikasi terhadap dokumen yang disampaikan oleh parpol di masa pencermatan rancangan DCT,” terangnya.

Untuk kendala secara umum tidak ada namun biasanya terjadi di akhir-akhir waktu masa penyerahan berkas karena kemungkinan masih ada partai sampai dengan limit waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan proses penyampaian dokumen administrasi baik melalui Silon maupun secara fisik.

Pelaksanaan peralihan data DCS ke DCT ini juga dipantau langsung Bawaslu

Sumsel dengan menempatkan timnya di KPU Sumsel.

Ketua Bawaslu Sumsel Kurniawan mengatakan, ada memang beberapa hal yang mereka awasi di masa peralihan ini diantaranya dengan data calon yang Memenuhi Syarat (MS) serta berstatus mantan narapidana.

Bawaslu juga mengawasi Bacaleg yang masih berstatus kepala daerah, kepala desa atau perangkat desa serta Badan Pengawas Desa (BPD).

“Kita ingin memastikan terkait dengan Surat Pengunduran Diri dan kita juga mengawasi dengan Caleg yang berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Kalau ada kita ingin pastikan bahwa Caleg tersebut harus mengundurkan diri dan harus disertai surat pemberhentian dari ASN karena itu merupakan salah satu syarat mencalonkan diri sebagai Caleg,” terangnya.

Bawaslu juga akan melakukan pengawasan untuk Caleg yang Memenuhi Syarat (MS) namun ada kesalahan mengenai data diri atau dokumen pendaftaran serta melihat keterwakilan perempuan di partai masing-masing dan kita mengamati itu, keterpenuhan perwakilan kaum perempuan misalnya dari tujuh Caleg maka minimal keterwakilan perempuan ada Dua Caleg Perempuan.

“Bawaslu Provinsi Sumsel juga sudah mengeluarkan surat himbauan terkait Alat Peraga Sosialisasi serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengawasan penetapan DCT dan aktif untuk menanggapi hasil penetapan DCT,” terangnya.

Bawaslu Sumsel juga sudah melakukan pemetaan daerah mana saja yang berpotensi rawan pelanggaran terkait penetapan DCT. Pelanggaran itu bisa jadi soal tanda gambar dan nomor urut partai politik peserta pemilu serta nomor urut nama lengkap dan foto diri terbaru bakal calon.

“Terkait dengan pergantian bakal calon ada beberapa partai yang melakukan penggantian dan itu memang harus dicermati pergantian tersebut termasuk syarat administrasinya,” jelasnya.

Untuk peralihan dari DCS ke DCT Bawaslu Sumsel sedang melakukan inventarisasi seluruh alat peraga baik untuk Bacaleg DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota maupun calon DPD.

“Semuanya sedang kita sisir untuk memastikan bahwa atribut sosialisasi ini sudah sesuai dengan aturan dan akan kita rilis berapa banyak atribut alat peraga sosialisasi yang melanggar dan tindak lanjutnya kita akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mengeksekusi alat peraga sosialisasi tersebut,” ujarnya.

• RDR





“Saya cuma menyalahkan bahwa itu datangnya pada saat-saat injury time. Kalau boleh itu (aturan 30 persen keterwakilan perempuan dan caleg mantan narapidana) ditunda ke 2029”

*Ongku P Hasibuan*



# KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN DIMULAI PEMILU 2029 SAJA

**Komisi II DPR RI menyoroti putusan MA 24/2023 terkait 30 persen keterwakilan perempuan di Parlemen, mengingat dikeluarkannya putusan ini menjelang proses penetapan Daftar Calon Tetap (DCT). Apalagi, tahapan yang dilakukan sudah cukup panjang, sehingga secara teknis hal ini tidaklah mudah untuk dipecahkan.**

“Ini kan tidak mudah dilaksanakan secara teknis misalnya soal kuota 30 persen perempuan. Saya dari awal sebetulnya ini bukan soal kita sentimen atau subjektifitas soal gender perempuan atau lainnya ya, tidak,” kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Kamis, 5 Oktober 2023.

“Pertama kan di dalam undang-undang itu kan cuma disebutkan memenuhi syarat minimal 30 persen, soal penghitungannya cara hitungnya enggak diatur dalam UU, selama ini cara penghitungannya disusun di dalam PKPU, saya beberapa kali mengatakan kita yang rasional saja di dalam pengambilan keputusan,” ujarnya.

Menurut Doli, penghitungan yang ada saat ini janganlah memaksakan atau mengada-ada dan jangan membuat logika hitungan baru, mengingat secara kenyataan untuk mencapai keterwakilan perempuan 30 persen di Parlemen tidaklah mudah. Apalagi setelah KPU melakukan perhitungan bahwa tidak ada satu partai politik pun yang keterwakilan perempuannya di bawah 30 persen.

“Dan setelah dihitung oleh KPU, ternyata tidak ada satu partai politikpun yang di bawah 32 persen keterwakilan perempuan, dan itu sistem mereka yang online, itu mereka secara otomatis kalau ada partai politik yang mengajukan di bawah 30 persen pasti tertolak. Jadi sebetulnya secara prinsip dengan aturan UU semuanya sudah memenuhi. Ini yang saya kira juga harus kita pahami oleh kita semua,” terangnya.

Doli menambahkan, sebetulnya tidak mudah menggaet perempuan untuk menjadi calon legislative. Dia mengakui hal inilah yang menjadi tantangan sekaligus pekerjaan rumah bagi partai politik agar banyak perempuan yang terlibat terjun ke politik dengan sukarela.

“Jadi, saya misalnya seumpama sebagai pimpinan Partai Golkar itu sangat sulit loh mencari caleg perempuan yang betul-betul mereka serius mau menjadi caleg. Itu fakta-fakta di lapangan yang juga harus di-

pahami dan disadari oleh semua kita,” tutur politisi Partai Golkar ini.

Selain itu, Doli juga menyoroti soal Putusan MA 28/2023 terkait syarat masa jeda mantan terpidana pencabutan hak politik. Menurutnya, partai politik sudah mengikuti aturan yang ada dalam melakukan penyusunan daftar nama calegnya, termasuk mengkoordinasikan dengan KPU terkait putusan MA yang baru.

“Kita koordinasi dengan KPU kalau sebelumnya kemarin ada yang disebutkan 52 nama yang sebagai mantan napi yang ikut caleg dari total semua yang ikut mendaftarkan diri, ternyata dari pencerminan teman-teman KPU berdasarkan putusan MA yang terbaru itu cuma dua orang yang memang terkena. Jadi sebetulnya relatively teman-teman partai politik itu sudah memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan di dalam menyusun calegnya, terutama masalah soal teman-teman yang selama ini pernah terkena musibah terjerat masalah hukum itu,” paparnya.

Doli juga meminta KPU dan Bawaslu untuk senantiasa mengkoordinasikan seluruh perubahan-perubahan yang ada kepada KPU provinsi dan kabupaten/kota agar semua aturan ini bisa berjalan baik.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR, Ongku P Hasibuan, menilai, secara keseluruhan tahapan persiapan Pemilu yang dilaksanakan KPU Bawaslu, terutama di Sumatera Utara sudah cukup baik. Hanya saja, munculnya aturan-aturan baru yang dikeluarkan di masa injury time mengakibatkan semuanya perlu penyesuaian kembali.

“Saya cuma menyalahkan bahwa itu datangnya pada saat-saat injury time. Kalau boleh itu (aturan 30 persen keterwakilan perempuan dan caleg mantan narapidana) ditunda ke 2029. Kalau misalnya ketentuan itu diberlakukan, oke diberlakukan tapi mulai berlaku 2029, karena sekarang sudah masuk tahapan penyelesaian persiapan ini,” katanya.

Selain putusan MA soal keterwakilan perempuan 30 persen di Parlemen, juga soal caleg mantan narapidana, Ongku mengatakan masih ada perkembangan lainnya yang seolah terus-menerus dan tanpa ada hentinya. Misalnya saat ini menunggu adanya putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemilihan presiden yang menyangkut batas usia 35 tahun dan sebagainya.

“Kita kadang-kadang terkaget-kaget juga dengan adanya keputusan-keputusan MK. Ini kan di saat-saat injury time seperti ini tinggal tanggal berapa sudah kita harus masukkan DCT keluar dan sebagainya. Ini masih ada per-

aturan-

peraturan yang masih harus diubah dan sebagainya atas perintah daripada Mahkamah Agung ataupun Mahkamah Konstitusi, terutama yang paling akhir kan tentang keterwakilan perempuan,” ungkapnya.

Ongku mengatakan, dengan banyaknya peraturan dan putusan pemerintah yang dikeluarkan ini perlu diantisipasi. Menurutnya, saat ini, KPU Sumut masih menunggu surat edaran dari pusat untuk secepatnya beradaptasi dengan aturan yang ada. Jika tidak dilakukan penyesuaian, maka hal ini dapat menimbulkan sengketa, mengingat potensi itu sangatlah besar.

Begitupun dengan wacana pemerintah memajukan pelaksanaan Pilkada Serentak di September 2023. Secara kesiapan, pihak KPU dan Bawaslu menyatakan kesiapannya, namun Ongku belum melihat langkah konkret dari kesiapan itu.

“Kalau dari pusat mereka sendiri mereka bilang siap, tapi kita sendiri belum lihat langkah-langkah konkretnya, mereka bilang mereka siap, karena ada lagi masalah baru bahwa pilkada mau dimajukan ke September. Usulan dari Mendagri sudah ada, kita sudah RDP, sudah ngomong dengan Mendagri, tetapi istilahnya adalah bahwa bener gak kita siap, saya khawatir kalau terjadi putaran kedua pilpres,” katanya.

Ongku menambahkan, wacana pilkada dimajukan selain berkorelasi dengan lamanya pelaksanaan pemilihan presiden, juga bergantung pada berapa kali putaran pilpres akan dilakukan. Selain itu anggaran yang ada saat ini dan sudah disetujui hanya untuk satu putaran, sehingga Ongku menekankan pihak KPU dan Bawaslu untuk tidak hanya berkata siap, namun kenyataannya hanya seperti jargon.

“Bukan konsep kalau menurut saya, cuma jargon menurut saya mohon maaf nih, katakan siap-siap saja kalau sudah perintah UU kita siap. Kita siap tetapi bagaimana siapnya, siap itu kalau nanti ujung-ujungnya grasak-grusuk bisa bahaya juga akhirnya kualitas pemilu kita ini akan dipertanyakan.

Kalau kualitasnya jelek ya legitimasinya juga jadi rendah,” tutupnya.

•RDO







“Jadilah TNI yang profesional dan netral dalam pemilu”

Moeldoko

# TNI BAWA KEDAMAIAN TAHUN POLITIK

**Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang kini berusia 78 tahun diminta untuk ikut menjaga kedamaian karena sudah memasuki tahun politik.**

Presiden Joko Widodo meminta TNI memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan politik itu wajar. Dia berharap TNI juga tetap menjaga netralitas.

“Kita ini telah memasuki tahun politik. Saya minta tetap jaga betul kondisi damai, segera padamkan percikan sekecil apa pun,” kata Jokowi di Monas, Jakarta Pusat, Kamis (5/10/2023).

“Berikan pemahaman kepada masyarakat bahwa beda pilihan itu wajar, menang dan kalah itu juga wajar, tetap jaga sinergisitas dengan Polri dan tetap jaga netralitas TNI. Dan tetap pelihara watak kesatria, selalu jadikan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit pegangan dalam bertindak,” tambahnya.

Jokowi juga memberikan semangat kepada TNI untuk mengabdikan menjaga bangsa dan negara Indonesia.

Selain itu, Jokowi juga mengapresiasi survei tingkat kepercayaan masyarakat kepada TNI yang selalu berada di posisi teratas. Jokowi meminta kepercayaan publik itu terus dijaga.

“Saya senang kepercayaan masyarakat terhadap TNI terus terjaga, dan selalu menanggapi uraian teratas berdasarkan hasil survei per September 2023, dengan angka kepercayaan 83-90 persen,” kata Jokowi.

Jokowi meminta TNI menyusun langkah-langkah strategis ke depan dengan baik. Terlebih lagi, kondisi dunia saat ini dipenuhi ketidakpastian.

“Dan untuk dapat terus mendapatkan kepercayaan tersebut, TNI harus mampu merumuskan secara akurat, merumuskan langkah-langkah dan strategi konkret ke depan di tengah kondisi dunia yang berubah sangat cepat dan memanasnya geopolitik dunia,” ujar Jokowi.

Jokowi

mengucapkan selamat ulang tahun ke-78 TNI kepada seluruh tentara di mana pun bertugas. Jokowi berterima kasih TNI telah menjadi perisai menjaga NKRI.

“Terima kasih atas dedikasi, atas keberanian, profesionalisme dan pengabdian seluruh anggota TNI yang menjadi benteng terdepan pertahanan negara, yang menjadi kekuatan pelindung rakyat, yang menjadi perisai penjaga NKRI, perisai penjaga Pancasila, perisai penjaga UUD 1945,” ujar Jokowi.

Panglima TNI, Laksamana Yudo Margono, menjamin TNI tetap netral saat Pemilu 2024. Dia mengatakan netralitas merupakan kewajiban anggota TNI aktif meski banyak purnawirawan yang berkecimpung di dunia politik.

“Ya saya enggak bisa pengaruhi beliau (purnawirawan), tapi saya pengaruhi prajurit saya. Saya akan menekankan pada prajurit saya seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bagaimana cara-cara TNI tetap netral,” kata Yudo.

Yudo mengatakan menjaga netralitas merupakan kewajiban TNI. Dia yakin semua anggota TNI berkomitmen menjaga netralitas.

“Itu kunci utama cara-caranya bagaimana tergantung kita. Saya Panglima, para kepala staf angkatan, juga komandan-komandan satuan, semuanya pasti akan berkomitmen untuk netralitas TNI,” tegasnya.

Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko, juga meminta anggota TNI benar-benar menjalankan amanat Presiden Jokowi, terutama terkait persoalan pangan dan netralitas di tahun politik menjelang Pemilu Serentak 2024.

Terkait persoalan pangan, menurut Moeldoko, TNI harus bisa memahami situasi global saat ini, di mana krisis pangan menjadi isu sentral.

“TNI harus ikut berkontribusi menyelesaikan persoalan pangan agar bisa dipecahkan sebaik-baiknya,” tambah

bahnya.

Sementara itu, dalam konteks politik, Moeldoko meminta TNI dapat menjaga profesionalitas dengan tidak melibatkan diri selama proses kontestasi pemilu. TNI harus terus menjaga proses politik berjalan damai dan mencegah terjadinya perpecahan akibat perbedaan pilihan politik.

“Jadilah TNI yang profesional dan netral dalam pemilu,” kata mantan panglima TNI tersebut.

Moeldoko pun berharap TNI, di usianya yang ke-78, dapat menjadi semakin hebat, semakin profesional, dan dicintai oleh rakyat Indonesia.

Sementara, Ketua DPR, Puan Maharani, mengingatkan prajurit TNI untuk ikut menyaksikan Pemilu 2024 dengan tetap menjunjung tinggi netralitas dan bahu membahu mengawal pesta demokrasi. Sebab, pelaksanaan Pemilu 2024 akan menjadi salah satu faktor mempercepat langkah bangsa mewujudkan Indonesia Emas 2045.

“Sebagai pilar pertahanan dan keamanan negara, TNI harus bisa menjaga integritas dan profesionalisme agar tetap netral dan tidak terlibat politik praktis,” kata Puan.

Puan meminta agar pimpinan TNI dapat memberikan teladan kepada seluruh personilnya untuk mengedepankan profesionalitas dan integritas prajurit.

“Pimpinan TNI harus bisa menjaga kesolidan agar tidak ada satupun anggotanya yang ikut terlibat dalam politik praktis, baik

secara langsung ataupun tidak langsung,” ujarnya.

Dia juga mengapresiasi upaya TNI sebagai pelindung dan penjaga kedaulatan negara yang telah berjuang memastikan bangsa Indonesia hidup dalam kedamaian dan kemerdekaan. “Kepedulian TNI terhadap keamanan negara dan kesejahteraan rakyatnya adalah nilai yang sangat kita hargai. Tri Dharma Eka Karma,” ucapnya.

Di samping ancaman kedaulatan negara, Puan juga mencermati tanggung jawab TNI lainnya dalam mengatasi ancaman nir-militar seperti ancaman bencana alam.

“TNI memiliki struktur organisasi yang vertikal dari pusat hingga ke daerah, sehingga pengerahan sumber daya dapat dilakukan dengan efektif dalam setiap membantu penanganan bencana. Fungsi TNI tersebut sangat penting dan krusial, hal ini yang perlu terus dikomunikasikan kepada penerus di TNI sehingga ketika terjadi bencana,” ujarnya.

Dia meyakini TNI akan mampu menjalankan tugas dan amanah dalam memperkuat dan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena telah menjadi kebanggaan dan benteng pertahanan Indonesia selama ini.

“Saya yakin bahwa TNI akan terus menjadi organisasi yang semakin profesional, semakin bersinergi dengan institusi lainnya untuk kepentingan negeri, dan semakin dekat dengan hati rakyat Indonesia,” tuturnya.

Dia juga menilai prajurit TNI terus membuktikan telah menjadi tentara rakyat yang sesungguhnya dengan turun langsung membantu masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan.

“Kehadiran TNI adalah jaminan bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kesatuan dan kedamaian. TNI juga memiliki peran dalam memastikan kesejahteraan rakyat. Saya berharap bahwa TNI akan terus memperkuat, memperbesar, dan menyatukan NKRI dengan sebaik-baiknya,” ungkap Puan.

Memperingati HUT Ke-78 TNI, Puan pun berharap seluruh prajurit TNI dapat memberikan manfaat langsung bagi seluruh rakyat Indonesia.

“TNI adalah garda terdepan negara, seluruh rakyat memberikan kepercayaan bahwa TNI dapat menjaga kedaulatan dan pertahanan negara. Atas nama pimpinan DPR RI dan seluruh rakyat Indonesia, saya ucapkan selamat memperingati HUT Ke-78 TNI bagi seluruh prajurit. Dirgahayu TNI. Jaya selalu di darat, laut, dan udara,” kata Puan. •RDO





“Ya pasti akan dikerjai. Pasti akan disikat dan ini bukti Nasdem dikerjai dengan kasus-kasus korupsi begitu”

Ujang Komarudin



# NASDEM DIGUNCANG ISU KORUPSI

**Partai Nasdem kembali menghadapi menghadapi guncangan saat Syahrul Yasin Limpo (SYL) ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.**

Sebelumnya, pada Mei tahun ini, Johnny Gerrard Plate yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Nasdem sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika, juga menjadi tersangka kasus korupsi BTS 4G senilai Rp8,32 triliun.

SYL mengatakan siap menghadapi persoalan kasus dugaan korupsi yang menimpanya secara bertanggung jawab.

Dia juga sudah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai menteri pertanian kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Kementerian Sekretariat Negara, di Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023.

“Saya orang Bugis Makassar dan rasanya harga diri jauh lebih tinggi dari pada pangkat atau jabatan. Biarkan saya hadapi ini, dan beri saya kesempatan membuktikan bahwa saya terbiasa mengurus rakyat,” kata SYL.

Untuk menjalankan tugas Menteri Pertanian, Presiden Jokowi telah mengangkat Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, sebagai pelaksana tugas (Plt). Penunjukan Kepala Bapanas sebagai pelaksana tugas Menteri Pertanian dilakukan agar lebih memudahkan dalam koordinasi.

“Karena biasanya kita Bu-log, Badan Pangan (Nasional), Mentan, Menteri Perdagangan ini selalu harus satu. Jadi untuk konsolidasi saja supaya lebih memudahkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, berharap, kasus yang menimpa SYL bukan politisasi hukum. Namun, ia menilai, kasus itu tentu berdampak ke pemerintahan Anies-Muhaimin di Pilpres 2024.

Ia mengingatkan, Partai Nasdem merupakan institusi partai politik yang tidak

bisa mempengaruhi aparat penegak hukum. Termasuk, tidak memiliki kekuatan menjamin aparat penegak hukum tidak terbebas dari politisasi.

Terkait dampak kasus SYL kepada Anies-Muhaimin, ia merasa, pasti ada. Tapi, sejauh mana dampak itu tergantung kepada dukungan dari masyarakat yang memiliki harapan merubah Indonesia menjadi lebih baik.

Paloh menegaskan, upaya-upaya membawa misi baru gerakan perubahan yang diusung Koalisi Perubahan harus berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ia meyakini, apa yang menimpa Nasdem bisa memberi dampak positif bagi Amin.

“Saya yakin, salah-salah bukan memberikan efek yang negatif, insya Allah barangkali justru akan mendapat sesuatu, empati barangkali,” kata Paloh.

Menurut Paloh, itu bisa terjadi kalau kasus ini memang dilihat dengan pendekatan secara terang dan terbuka. Tapi, ia menekankan, sampai saat ini Partai Nasdem akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Artinya, Partai Nasdem akan memberikan kesempatan maupun penghormatan kepada aparat penegak hukum untuk berproses menjalankan tugasnya. Sehingga, jika sudah sampai di pengadilan semua bisa jelas.

Surya Paloh juga mengklarifikasi tentang janjinya pada delapan tahun silam yang bakal membubarkan partai jika kadernya melakukan korupsi.

Dia mengonfirmasi bahwa maksud atas hal itu adalah berupa makna tersirat. Dia tidak benar-benar ingin membubarkan partai jika kedatangan kader-kadernya melakukan korupsi, melainkan hanya bentuk wanti-wanti kepada kader-kadernya.

“Enggak demikian meaning-nya. Enggak ada. Lebih tolot ketua umum partai mengatakan kalau ada kader partai

yang korupsi partai dibubarkan. Bodoh!” ungkap Surya.

Surya menegaskan makna dari penyampaian tidak dimaknai secara denotasi. Sebaliknya, makna yang dimaksudnya bersifat konotatif alias bukan makna sebenarnya.

“Jadi maknanya bukan begitu. Spirit semangat kita untuk antikorupsi, enggak ada artinya kita ini kalau kader kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan tercela. Untuk apa kita punya institusi seperti ini? Nah spiritnya seperti itu,” jelas dia.

Lebih lanjut, dia pun menyebutkan bahwa bisa jadi kader-kader partai merupakan oknum-oknum tertentu yang mau mencoreng nama baik partai. Pihak-pihak ini dinilai merugikan kader-kader yang sebenarnya baik.

“Ada kader partai, siapa menjamin kader partai itu, penyusup bisa masuk jadi kader partai kita hari ini. Pun melakukan tindakan tercela. Anak-anak negeri ini datang dengan penuh cita-cita, idealisme, pengabdian, berjuang bersama di dalam satu partai harus menjadi korban karena satu, dua, tiga orang ini tidak tepat,” tutur dia.

“Jadi saya intinya mengoreksi, bukan itu (makna) sesungguhnya,” sambungnya.

Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai kasus korupsi yang menimpa dua kader Partai NasDem yang menjadi menteri di Kabinet Indonesia Maju harus menjadi bahan evaluasi penting bagi partai pimpinan Surya Paloh. Menurutnya, hal itu menjadi pukulan telak yang harus dihadapi Nasdem dan Surya Paloh.

Menurutnya, meskipun kasus ini sudah berlangsung cukup lama dan tidak ada keterkaitan langsung dengan dukungan Partai NasDem terhadap Anies Baswedan, namun dampaknya bisa dirasakan.

“Kasusnya udah lama juga ya itu. Itu tidak ada hubungannya. Tidak akan menyelamatkan SYL kalau Nasdem membatalkan dukungannya kepada Anies. Setahu saya

tetap berjalan tuh. Kalaupun kemudian nanti Nasdem menarik diri membatalkan Anies jadi capres,” kata karyono saat dihubungi Info Indonesia, Jumat, 6 Oktober 2023.

Karyono menuturkan, kasus ini telah menciptakan persepsi negatif terhadap Partai NasDem. Terjeratnya dua kader partai ini dalam kasus korupsi dan menjadi tersangka, akan berdampak pada pemilu 2024. Publik semakin curiga terhadap integritas Partai NasDem yang dapat mengurangi tingkat dukungan dan elektabilitas.

Hasil survei yang menunjukkan tren menurun dibandingkan dengan Pemilu 2019, menggambarkan betapa berpengaruhnya kasus ini.

“Terjeratnya dua kader Nasdem dalam kasus korupsi dan menjadi tersangka, itu juga berpengaruh terhadap Pemilu 2024, karena itu berpengaruh terhadap persepsi. Persepsi publik terhadap Partai Nasdem, bobrok, negative, dan itu akan berpengaruh terhadap tingkat dukungan atau elektabilitas. Dan ini terkonfirmasi Nasdem suaranya dari sejumlah hasil survei, trennya menurun dibandingkan 2019,” ucap Karyono.

Karyono menambahkan, kasus korupsi ini juga dapat berdampak pada pasangan calon presiden yang diusung oleh Partai NasDem. Meskipun dampaknya belum jelas sejauh mana, tetapi ada potensi persepsi negatif terhadap partai ini dapat memengaruhi pemilihan presiden di masa depan.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, mengatakan, Partai NasDem harus siap menghadapi konsekuensi dari dukungannya yang berbeda dengan pemerintah saat ini.

“Ya sikapnya harus bertahan, harus kuat, gitu ya, itu konsekuensi dari beda usungan, beda dukungan di pilpres dengan pemerintah,” kata Ujang.

Ujang mengungkapkan, sebagai partai yang berbeda usungan dengan pemerintah, Nasdem harus siap menjadi sasaran ‘dikerjai’ oleh persoalan hukum. Terutama terkait dengan kasus-kasus korupsi yang sudah menimpa dua kadernya sebagai menteri.

“Ya pasti akan dikerjai. Pasti akan disikat dan ini bukti Nasdem dikerjai dengan kasus-kasus korupsi begitu,” Kata Ujang.

Ujang meyakini, NasDem dan Surya Paloh seharusnya sudah memahami konsekuensi tersebut. Dia mengatakan, jika memang NasDem kuat, maka mereka akan bertahan. Namun, jika tidak kuat, pasti akan berkompromi dan negosiasi dengan pemerintah saat ini.

“Kalau memang hebat ya bertahan dan kuat. Tapi kalau memang tidak kuat pasti akan berkompromi dengan Jokowi, akan negosiasi dengan Jokowi, akan deal ulang dengan Jokowi, soal skemanya seperti apa ya kita tidak tahu,” tutur Ujang.

“Oleh karena itu ya dua hal saja. Bisa bertahan mengungsi Anies atau berkompromi lagi dengan Jokowi soal Pilpres. Kita lihat saja ke depan. Jadi dua kemungkinan itu yang bisa terjadi di Nasdem,” terangnya.

•RDO







“Dilematis wacana Jokowi memimpin PDIP. Sementara masih ada Puan Maharani, bahkan Prananda”

Dedi Kurnia Syah

## Gantikan Megawati Jadi Ketua Umum PDIP

# JOKOWI LAWAN TRAH SOEKARNO

**Presiden Joko Widodo diusulkan oleh Guntur Soekarnoputra sebagai Ketua Umum PDIP untuk menggantikan Megawati Soekarnoputri. Namun, usulan tersebut mendapatkan penerimaan dan penolakan dari internal partai banteng.**

**T**erkait isu tersebut, Joko Widodo menegaskan ingin menghabiskan masa pensiunnya di Solo, Jawa Tengah, setelah dua periode menjadi presiden. Masa jabatan Presiden Jokowi sendiri akan berakhir pada 20 Oktober 2024.

“Saya mau pensiun, pulang ke Solo,” kata Jokowi se usai upacara peringatan HUT ke-78 TNI di Monas, Jakarta, Kamis, 5 Oktober 2023.

Jokowi menuturkan banyak tokoh muda yang layak menjadi Ketua Umum PDIP. Dia mencontohkan Ketua DPR, Puan Maharani, dan Prananda Prabowo.

“Banyak yang muda-muda. Mbak Puan, Mas Prananda,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, mengatakan, Jokowi pastinya dilematis jika menggantikan Megawati Soekarnoputri dari kursi ketua umum PDIP. Sebab, ada dua trah Soekarno yang saat ini masih sangat kuat pengaruhnya di PDIP, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo.

“Dilematis wacana Jokowi memimpin PDIP. Sementara masih ada Puan Maharani, bahkan Prananda,” kata Dedi kepada Info Indonesia.

Dia menyampaikan, Puan Maharani pastinya akan menjadi prioritas PDIP untuk menggantikan

Megawati Soekarnoputri. Apalagi, Puan Maharani kader murni partai banteng.

“Puan perlu dipertimbangkan, bukan karena ia puteri Megawati, tetapi, ia kader murni PDIP sekaligus salah satu tokoh yang ikut merasakan represi kekuasaan pada PDIP, ketika Megawati hadapi konflik dengan kekuasaan, Puan Maharani ada disamping Megawati,” kata Dedi.

Di samping itu, Puan Maharani kerap menduduki jabatan strategi di pemerintahan. Dia pernah menjadi Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK). Selain itu, kini dia menjabat Ketua DPR RI. Apalagi, Puan Maharani merupakan trah Megawati Soekarnoputri.

“Posisi Puan saat ini adalah ketua DPR, dan itu kekuasaan yang setara dengan Jokowi. Artinya, Puan tentu lebih unggul dari Jokowi karena secara kekaderan ia mencolok, dan juga ia membawa trah Megawati,” jelas Dedi.

Sedangkan, Jokowi hanya kader biasa dan bukan kader ideologis. Jokowi juga tengah diisukan sedang bermain dua kaki di Pilpres 2024. “Sementara, Jokowi hanya kader biasa, yang bahkan kondisi saat ini justru potensial tidak lagi loyal pada Megawati,” kata Dedi.

Dia mengusulkan, sebaiknya

Jokowi menduduki kursi Dewan Pembina. Menurut Dedi, jabatan tersebut cukup strategis bagi Jokowi. “Lebih strategis dan menjaga marwah jika duduk sebagai pembina,” jelas Dedi.

Pasca tidak lagi menjabat sebagai Kepala Negara, Jokowi tentunya masih ingin terlibat dalam kegiatan perpolitikan Tanah Air. Menurutnya, jika Jokowi menjadi ketua umum hanya akan menurunkan ketokohan dari mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

“Bagaimanapun Presiden perlu menjadi tokoh bangsa, jika harus menjadi ketua umum tentu bisa turunkan kualitas ketokohan kebangsaannya,” kata Dedi.

Dia menilai, pengaruh Jokowi setelah tidak menjabat sebagai Presiden akan turun sangat dratis. Hal itu terlihat dari hasil survei IPO terbaru. Sejak awal Maret hingga Agustus 2023, tingkat keterpengaruhan Jokowi terbilang rendah.

“Saat ini saja dalam catatan IPO, pengaruh Jokowi di antara 17 hingga 19 persen, berdasarkan survei pada Maret hingga Agustus lalu. Artinya, pemilih hari ini memiliki pilihan sendiri tanpa harus mengikuti pilihan Jokowi,” terang Dedi.

Tidak hanya pada pemilih, kata Dedi, bahkan pengaruh Jokowi terhadap elite politik juga menurun. Selepas tak menjabat Kepala Negara, kemungkinan besar Jokowi akan ditinggalkan pengikutnya.

“Bagi elit politik, pengaruh Jokowi akan berkurang drastis saat ia turun kuasa, kita bisa lihat tokoh sebelumnya, Soeharto sekalipun begitu usai, tidak banyak elit politik yang merapat,” jelas Dedi.

Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, menilai, peluang Jokowi menggantikan Megawati dari kursi ketua umum terbilang sangat kecil. Hal itu berbanding terbalik dengan Puan Maharani.

Menurutnya, Puan Maharani memiliki keuntungan yang cukup besar.

Sebab, dia merupakan trah dari Megawati Soekarnoputri yang juga putri dari Bung Karno.

“Peluang Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP lebih kecil dibanding trah atau penerus Soekarno seperti Puan atau Prananda,” kata Yusak.

Dia menyampaikan, Megawati selama ini telah sukses menjadi nakhoda PDIP, karena berhasil mengantarkan Jokowi memimpin pemerintahan dua periode. Selain itu, berhasil menjadikan PDIP sebagai pemenang Pemilu.

“Sukses Megawati memimpin PDIP semakin mengokohkan keberlanjutan trah soekarno di tubuh PDIP. Sukses story PDIP dalam memegang supremasi elektoral dua kali pemilu berturut-turut tidak bisa dilepaskan dari kepemimpinan politik Megawati,” ucap Yusak.

Menurutnya, keberhasilan Megawati dalam memimpin PDIP akan membuat kader partai banteng itu sulit melupakan trah Soekarno.

“Ini yang membuat bayang-bayang Soekarno sulit diruntuhkan di tubuh PDIP,” kata Yusak.

Yusak mengatakan, meskipun Jokowi adalah kader terbaik PDIP saat ini. Akan tetapi, Jokowi tidak mewarisi gen Soekarno. Di samping itu, latar belakang dari Puan Maharani cukup kuat di PDIP. Dia juga merupakan cucu dari Soekarno.

“Apalagi masih ada Puan yang masa depan politiknya masih panjang,” imbuh Yusak.

Kendati begitu, Yusak menilai, peluang Jokowi masih ada untuk merebut tahta Megawati Soekarnoputri di PDIP. Namun,

Jokowi bisa saja menjadi ketua umum asalkan Megawati mengizinkannya.

“Saya kira Mega akan tetap mengokohkan soekarnisme sebagai nyawa dan spirit perjuangan PDIP,” tandas Yusak. ●RDO





“Andai akhirnya PD mengambil posisi menteri, PD akan mencoba merumuskan diksi yang tepat biar tak mengecewakan para pemilihnya yang masih berharap PD sebagai oposisi pemerintah”

Efriza



# DEMOKRAT DAPAT MENTERI ATAU CAWAPRES

**Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Bogor, awal bulan ini, membuat banyak spekulasi bermunculan.**

Momentum pertemuan keduanya cukup langka terjadi lantaran SBY sebagai pendiri Partai Demokrat dianggap sebagai antitesis pemerintahan Jokowi, sekaligus digadang-gadang menjadi lawan kritis PDIP. SBY juga telah lama perang dingin dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

SBY dan Megawati dinilai seperti minyak dan air yang tak bisa bersatu di konstelasi politik nasional karena berbeda pandangan mengenai arah pembangunan bangsa.

Pengamat politik Citra Institute, Efriza, menilai, pertemuan SBY dan Jokowi lebih pada pembahasan soal pemilu. Sebab, pertemuan itu berlangsung tak lama setelah Partai Demokrat resmi mendeklarasikan dukungan kepada bakal calon presiden Koalisi In-

donesia Maju, Prabowo Subianto.

Efriza menyebut, pertemuan antara Jokowi dan SBY lebih membahas terkait kemungkinan membangun kerja sama politik dalam rangka menyambut Pemilu 2024. Pasalnya, selain mendukung Ganjar Pranowo menjadi calon presiden, Jokowi sejauh ini dianggap bermain politik dua kaki, dengan mendukung pula Prabowo Subianto.

Efriza menilai, pertemuan kedua tokoh itu juga sebagai langkah awal dalam membangun kerja sama politik antara PDIP dan Demokrat dalam menghadapi pemilu serta pasca Pemilu 2024.

“PD tentu saja saat ini menilai posisi dia terjepit. Sudah kadung di pemerintah, karena bergabung dengan KIM dan mengukung Prabowo yang merupakan representasi dari pemerintahan,” kata Efriza saat dihubungi, Jumat, 6 Oktober 2023.

“Hanya saja memungkinkan ada pembicaraan soal membangun kerja sama saat ini maupun ke depannya. Pembicaraan ke depannya tentu saja terkait pasca pemilu. Ini menunjukkan PDIP dan PD, maupun oposisi dan pemerintah sama-sama sudah bisa bersinergi,” sambung Efriza.

Menurut Efriza, pembicaraan saat ini kemungkinan juga tentang reshuffle kabinet dan cawapres Prabowo. Sebab, pasca keputusan bergabung dengan KIM, Demokrat secara tidak langsung sudah berada di barisan pemerintah.

Efriza menuturkan, keputusan Demokrat berlabuh ke KIM tidak terlepas dari ungkapan rasa sakit hati kepada Partai Nasdem dan Anies Baswedan yang resmi meminang Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, menjadi cawapres di Koalisi Perubahan.

“Jadi memungkinkan saja AHY akan mengisi jabatan di posisi kementerian, sebab memang Jokowi dari dulu ingin bekerja sama dengan PD, namun semua terbentur posisi berseberangan antara PD dengan pemerintah.

Sekarang ini, semuanya sudah bersinergi memungkinkan juga pro-

gram di era SBY dengan Jokowi saling disinergikan, tidak lagi dipilah-pilih,” tutur Efriza.

Selain itu, Efriza melihat bahwa Partai Demokrat saat ini kemungkinan tak lagi kukuh sebagai oposisi lantaran memiliki target untuk meraih suara elektoral dan memenangkan Prabowo menjadi presiden pada Pemilu 2024.

Efriza mengatakan, keseriusan Demokrat untuk memenangkan Prabowo menjadi presiden pada Pemilu 2024 dibuktikan dengan aksi SBY yang memutuskan untuk turun gunung dalam cawe-cawe politik membangun komunikasi dengan tokoh politik senior jalur Pilpres 2024.

“Target mereka saat ini adalah memenangkan KIM dan capresnya Prabowo, sebagai bentuk unjuk kemampuan kepada Anies dan Nasdem. Mengalahkan Anies dan Nasdem adalah target utamanya,” ujar Efriza.

“Hanya saja, PD masih berpikir bijak melanjutkan sebagai oposisi atau bersama di pemerintahan. Meski sebagai oposisi mereka hanya ingin tetap teguh dalam sikap, tapi dalam pilpres ia sudah menerima bersama pemerintah karena bersama KIM dan Prabowo,” sambung Efriza.

Efriza mengungkapkan, jika tawaran untuk mengisi kabinet Presiden Jokowi diterima Demokrat, maka dapat berimplikasi pada menurunnya elektabilitas partai. Hal itu lantaran figur AHY maupun SBY sejauh ini cukup dikenal oleh publik sebagai representasi oposisi pemerintah.

“Andai akhirnya PD mengambil posisi menteri, PD akan mencoba merumuskan diksi yang tepat biar tak mengecewakan para pemilihnya yang masih berharap PD sebagai oposisi pemerintah, sebab itu yang juga mendongkrak elektabilitas,” kata Efriza.

Menurut Efriza, jika nantinya Jokowi menawarkan masuk kabinet, kemungkinan Demokrat akan mengambilnya sebagai upaya balas dendam kepada Partai Nasdem.

“Jadi, nanti bisa saja diambil Demokrat sebagai upaya membuat Nasdem sakit hati. Namun jika ini yang diambil, sepertinya PD nanti juga bakal berpikir keras soal siapa yang akan dimajukan sebagai Menteri Pertanian,” kata Efriza.

Efriza mengatakan, momentum pertemuan SBY dan Jokowi merupakan keseriusan Partai Demokrat untuk memenangkan Prabowo di Pilpres 2024. Selain itu, juga ajang balas dendam pada Anies Baswedan dan Nasdem yang telah menyakitkan perasaan seluruh jajaran partai.

Efriza mengatakan, sikap seolah ingin balas dendam yang ditunjukkan Partai Demokrat telah menguntungkan Prabowo Subianto untuk selangkah lebih maju dibandingkan dua calon lain lantaran bertambah kekuatan politik jelang Pilpres 2024.

Efriza melihat, selain membahas soal kerja sama politik, pertemuan antara SBY dan Jokowi dinilai sebagai agenda melobi dan meyakinkan Jokowi untuk memilih AHY sebagai cawapres Prabowo. SBY tentu saja untuk melampiaskan balas dendam pada Anies dan Partai Nasdem yang memberikan harapan palsu kepada AHY untuk menjadi cawapres di Koalisi Perubahan.

Kendati demikian, posisi Partai Demokrat yang saat ini terjepit juga menjadi pertimbangan kenapa SBY terpaksa turun gunung ikut merancang strategi dan manuver pada Pemilu 2024.

Efriza mengatakan, jika Mahkamah Konstitusi (MK) menerima putusan tentang penurunan perolehan usia capres/cawapres, maka Partai Demokrat memungkinkan terpaksa menerima posisi menteri di akhir masa jabatan Presiden Jokowi.

“Namun ini semua sepertinya benar-benar akan dikaji bijak oleh PD. Sebab target PD adalah ingin jabatan cawapres buat AHY, sekaligus mengalahkan Anies dan Nasdem,” tutur Efriza.

“Namun mereka paham bahwa penguasa politik bisa melakukan apa saja, makanya mereka bertemu untuk merumuskan kemungkinan kerja sama ke depan, sekarang, maupun tukar-menukar kepentingan antara PD dan Jokowi sebagai presiden,” tandas Efriza. •RDO







“Ya itu memang pertanda perpecahan di internal PKB sebagai manifestasi dari rivalitas politik dalam rangka mempengaruhi suara warga NU di Pilpres 2024”

Igor Dirgantara

# PKB DIGEROGOTI LUAR DALAM

**Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai diganggu permasalahan, baik internal maupun eksternal, usai masuk gerbong Koalisi Perubahan yang mendukung Anies Baswedan. Sang ketua umum, Muhaimin Iskandar, yang kini berstatus bakal calon wakil presiden Anies, mulai berseteru dengan sesama kader PKB.**

Cak Imin, sapaan Muhaimin Iskandar, terlibat adu argument dengan Menteri Agama yang juga Ketua DPP PKB, Yaqut Cholil Qoumas, setelah kabar masuk gerbong Koalisi Perubahan awal September lalu.

Gus Yaqut mengutarakan sindiran yang mengarah kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Koalisi Perubahan yang disingkat AMIN alias Anies-Muhaimin.

Gus Yaqut memberikan pernyataan yang meminta masyarakat agar tak memilih calon pemimpin negara dan pemerintahan Indonesia di Pilpres 2024 yang memiliki karakteristik bermulut manis dan menggunakan agama untuk memenangkan kontestasi. Bahkan, dia spesifik menyebutkan contoh kasusnya seperti di Pemilihan Gubernur 2017.

Sementara, Cak Imin merespon satire Gus Yaqut dengan menyatakan akan menindak secara tegas dirinya dari PKB. Dalam arti mendisplinkan atau menyingkirkan adik Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu dari struktural partai.

Perang urat syaraf di antara dua elite PKB yang juga tokoh NU itu, tidak menutup kemungkinan karena keputusan politik bergabung dengan Koalisi Perubahan yang beranggotakan Partai Nasdem, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Kisruh di internal PKB antara Cak Imin dengan Gus Yaqut diperkirakan memberikan dampak signifikan kepada bakal calon presiden Koalisi Perubahan, Anies Baswedan, untuk memenangkan Pilpres 2024.

Menurut Direktur Polling dan Survei Indonesia (SPIN), Igor Dirgantara, pernyataan Gus Yaqut merupakan representasi dari keinginan politik sebagian kader PKB dan juga

warga Nahdliyin yang tidak setuju dengan sikap politik PKB bergabung dengan Koalisi Perubahan.

“Ya itu memang pertanda perpecahan di internal PKB sebagai manifestasi dari rivalitas politik dalam rangka mempengaruhi suara warga NU di Pilpres 2024. Menag Yaqut Cholil Qomas pernyataannya jelas lebih dekat dengan kemauan PBNU yang sekarang di bawah komando kakaknya, Yahya Cholil Staquf. Intinya NU bukan alat partai tertentu (PKB),” ujar Igor kepada Info Indonesia, Kamis, 5 Oktober 2023.

Di samping masalah internal yang tengah terjadi saat ini antara Cak Imin dengan Gus Yaqut, ada perpecahan di warga Nahdliyin lantaran keluarga Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dikhianati Cak Imin karena mengambilalih kepemimpinan PKB.

“Belum lagi ada friksi yang berkepanjangan antara Gusdurian dengan kepemimpinan Cak Imin di PKB. Tidak ada atau belum ada soliditas dari pemilih warga NU untuk memenangkan duet Amin saat ini. Fenomena ini juga menunjukkan tidak ada sinkronisasi antara basis masa Anies yang cocok dengan wacana perubahan dengan Cak Imin (PKB) dengan basis massa yang sebenarnya lebih suka keberlanjutan dari pemerintahan saat ini,” tuturnya.

Secara tidak langsung, Igor juga memandang suara sumbang Gus Yaqut menyindir arah politik PKB berkoalisi dengan Koalisi Perubahan dan hasrat politik Cak Imin menjadi cawapres, mengisyaratkan suara NU lebih cenderung kepada koalisi yang saat ini punya hubungan politik dengan rezim pemerintahan Presiden Joko Widodo.

“Dengan kata lain, basis massa PKB lebih suka jika partai ini bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) atau Koalisi PDIP, ketimbang berada di koalisi perubahannya Anies Baswedan,” ucapnya.

Pertimbangan lain yang membuat ada penolakan terhadap posisi PKB di Pilpres 2024, salah satunya adalah terkait tingkat elektabilitas Anies Baswedan, bahkan Cak Imin, yang tak kunjung menanggapi ketimbang Prabowo Subianto maupun Ganjar Pranowo.

“Jika dikatakan bahwa elektabilitas Anies tidak diangkat dengan Cak Imin sebagai cawapresnya itu juga disebabkan elektabilitas yang rendah dari Cak Imin itu sendiri yang menganggap dirinya sebagai representasi kader NU, jika dibandingkan dengan Mahfud MD atau Khofifah,” urainya.

Yang menjadi citra Cak Imin akhirnya juga tidak disukai oleh warga Nahdliyin maupun pengurus PBNU, kata Igor, adalah mengenai kepentingan politik yang ditafsirkan seolah haus jabatan, utamanya untuk jabatan tertinggi dalam struktur pemerintahan negara Indonesia, yang berdasarkan konstitusi dipilih melalui Pilpres.

“Ada persepsi publik yang melihat bahwa tujuan Cak Imin sebenarnya hanya ingin menjadi cawapres siapapun capresnya. Jika tidak jadi cawapresnya Prabowo atau Ganjar, ya jadi cawapresnya Anies. Bukan soal menang atau kalah,” ungkapnya.

Oleh karena itu, tujuan yang bersifat ambisius dari Cak Imin yang pernah menjabat Menteri Ketenagakerjaan memunculkan persepsi yang lebih ekstrem. Yaitu, menginginkan kursi RI 1 pada Pilpres periode selanjutnya yang akan digelar pada tahun politik 2029 mendatang.

“Menjadi cawapres adalah kalkulasi

politik Cak Imin agar ketokohnya lebih dikenal masyarakat luas. Tujuannya nanti maju sebagai capres lima tahun lagi di 2029, tentunya dengan kendaraan PKB lagi,” terangnya.

Pengamat politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, menilai perseteruan antara Cak Imin dan Gus Yaqut lagi-lagi menggambarkan ketegangan di tubuh NU akibat kontestasi pemilihan presiden.

Yaqut disebut merepresentasikan posisi PBNU yang kini dipimpin oleh kakaknya, Yahya Cholil Staquf. Sedangkan, Muhaimin Iskandar, yang memiliki riwayat panjang perseteruan dengan keluarga Gusdur, telah memilih menjadi calon wakil presiden Anies Baswedan, sosok yang dipersepsikan berseberangan dengan NU.

“Ketegangan PKB dan Gus Menteri (Yaqut) ini titik kulminasi (puncak) dari hubungan tak harmonis dari kubu yang berbeda. Gus Menteri kerap mengeluarkan statement yang bernada bercanda tapi sangat mengandung unsur politik yang dikaitkan dengan kritiknya ke kubu Amin (Anies-Muhaimin),” kata Adi.

Peneliti Indikator Politik Indonesia, Adam Kamil, menambahkan, perseteruan dua kubu ini akan memecah suara NU pada Pilpres 2024. Sebab, langkah Anies meminang Cak Imin bertujuan untuk menggaet suara NU yang kantong suara terbesarnya ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Meskipun, survei terbaru Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa langkah itu ternyata belum berdampak pada elektabilitas Anies di Jawa Timur yang lebih rendah dibandingkan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Besarnya basis massa NU juga membuat tokoh-tokohnya dilirik oleh kubu Ganjar dan kubu Prabowo.

Pada titik ini lah, Adam mengatakan sikap politik para tokoh dan kyai NU akan memengaruhi pilihan pemilihnya di akar rumput. Sedangkan, perseteruan dengan tokoh-tokoh PBNU yang kerap kritis terhadap Anies-Cak Imin akan sangat merugikan PKB. ●RDO





“Tingkat partisipasi memilih untuk memilih cawapres perempuan sangat tinggi jika Pilpres 2024 diikuti oleh cawapres Perempuan”

Yasin Mohammad



# YENNY NOMOR WAHID KHOFIFAH LEBIH DIPILIH

**Partisipasi memilih di Pemilu Serentak 2024 untuk memilih calon wakil presiden perempuan terbilang sangat tinggi. Hal itu tergambarkan dari hasil survei terbaru yang dirilis Lembaga Survei Independen Nusantara (LSIN).**

Founder LSIN, Yasin Mohammad, mengatakan, berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan pemilih akan memilih pasangan calon yang berpasangan dengan cawapres perempuan.

“Tingkat partisipasi memilih untuk memilih cawapres perempuan sangat tinggi jika Pilpres 2024 diikuti oleh cawapres perempuan, di mana 71 persen cawapres perempuan akan dipilih oleh responden,” jelas Yasin saat memaparkan hasil surveinya.

Sementara itu, tingkat keterpilihan cawapres representasi milenial cenderung rendah di bawah 20 persen. Sebab, pemilih muda cenderung tidak tertarik dengan cawapres dari kalangan milenial.

“Di segmen representasi milenial cenderung bersikap apatis dengan hanya 19 persen akan memilih cawapres representasi millennial,” ujar Yasin.

Kemudian, cawapres representasi Nahdlatul Ulama (NU) akan dipilih oleh responden dengan tingkat partisipasi sebesar 35 persen. Sedangkan, cawapres representasi etnis Jawa akan dipilih dengan tingkat partisipasi sebesar 30 persen. Yasin mengatakan, angka tersebut masih terbilang cukup rendah.

Yasin menuturkan, pemilih lebih cenderung netral dalam memilih cawapres dari kalangan NU maupun etnis Jawa.

“Sebagian besar memilih netral di a

atas 50 persen. Pun demikian pada cawapres representasi NU dan etnis Jawa,” terang Yasin.

Di samping itu, pada survei kali ini, LSIN juga melakukan simulasi lima cawapres representasi perempuan. Diketahui, Yenny Wahid menempati urutan teratas dengan mengalahkan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

“Elektabilitas cawapres perempuan dengan simulasi lima nama, Yenny Wahid memperoleh elektabilitas tertinggi 31,6 persen, Khofifah Indar Parawansa 29,0 persen, Susi Pudjiastuti 9,2 persen, Puan Maharani 7,2 persen, dan Sri Mulyani 4,0 persen. Sementara yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan 19,0 persen,” beber Yasin.

Sementara itu, ketika responden disodorkan tiga nama cawapres perempuan dengan simulasi tertutup, Yenny Wahid masih tetap di urutan teratas. Dia mengalahkan figur-figur yang sudah memiliki jam terbang politik yang cukup panjang seperti Ketua DPR RI, Puan Maharani.

“Yenny Wahid memperoleh elektabilitas tertinggi 34,4 persen, Khofifah Indar Parawansa 33,6 persen, Puan Maharani 9,7 persen, dan yang tidak menjawab atau belum menentukan pilihan 22,3 persen,” jelas Yasin.

Tidak hanya itu, LSIN juga melakukan simulasi pasangan calon presiden dengan cawapres perempuan. Terlihat dalam survei ini yang berpasangan dengan Yenny Wahid selalu mendapatkan elektabilitas tinggi. Contohnya capres dari PDIP, Ganjar Pranowo.

“Capres Ganjar-Yenny Wahid memperoleh elektabilitas tertinggi 33,0 persen. Urutan kedua Ganjar-Khofifah Indar Parawansa 30,2 persen. Ganjar-Puan Maharani 27 persen,” ujar Yasin.

Hal sama juga terjadi untuk capres Koalisi Indonesia Maju (KIM), Prabowo Subianto, jika berpasangan dengan Yenny Wahid. Dia akan mendapatkan elektabilitas yang sangat tinggi. Bahkan, elektabilitasnya mengalahkan perolehan ketika Ganjar berpasangan dengan Yenny Wahid.

“Simulasi tertutup Prabowo-Yenny Wahid memperoleh elektabilitas tertinggi 38,2 persen, Prabowo-Khofifah Indar Parawansa memperoleh elektabilitas 37,0 persen, dan Prabowo-Puan Maharani 29,6 persen,” terang Yasin.

Yasin mengatakan, Yenny Wahid menjadi figur cawapres yang berpotensi menjadi penentu kemenangan Pilpres 2024. Sebab, dalam berbagai simulasi yang dilakukan, Yenny Wahid selalu unggul dari kompetitornya.

“Sosok Yenny Wahid berpotensi menjadi faktor penentu kemenangan capres pada Pilpres 2024,” kata Yasin.

Analisis politik Citra Institute, Efriza, mengatakan, dari hasil survei itu terlihat bahwa Yenny Wahid selalu unggul dalam berbagai simulasi cawapres. Hal ini menunjukkan bahwa Yenny Wahid mendapatkan respons yang baik dari masyarakat jika maju sebagai kandidat cawapres.

Kendati begitu, dari pengalaman politik, Khofifah Indar Parawansa lebih unggul dibandingkan dengan Yenny Wahid. Putri Presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, itu belum memiliki pengalaman di birokrat yang cukup lama.

Melihat dari pengalaman tersebut, tentunya Khofifah Indar Parawansa yang berpeluang besar maju sebagai cawapres perempuan di Pilpres 2024. Apalagi, Khofifah Indar Parawansa punya legacy yang cukup baik saat memimpin Jawa Timur.

“Peluangnya Yenny dan Khofifah di a h di ya kini

lebih kuat Khofifah. Sebab, posisi Khofifah sebagai Gubernur Jawa Timur, keberhasilan kinerjanya amat diperhitungkan,” ujar Efriza.

Di sisi lain, Khofifah adalah sosok elite NU yang minim kontroversi. Dia lebih dikhawatirkan oleh Muhaimin Iskandar jika sebagai cawapres Ganjar atau Prabowo. Sebab jelas-jelas dapat melemahkan ceruk pemilih PKB di Jawa Timur.

Hal itu berbeda dengan Yenny Wahid yang kerap bersitegang dengan Muhaimin Iskandar. Hal itu diyakini akan menggelorakan semangat PKB untuk membuktikan ceruk pemilih Nahdliyin.

“Diyakini ini juga dinilai para capres, sehingga menomorsatukan representasi NU dari kalangan perempuan ya Khofifah,” kata Efriza.

Selain survei LSIN, Rumah Demokrasi melakukan survei di dua wilayah, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur, pada 28 Agustus hingga 4 September 2023.

Pimpinan Rumah Demokrasi, Ramdanyah, mengungkapkan terdapat respon positif terhadap munculnya cawapres perempuan pada Pilpres 2024. Yenny Wahid dinilai cawapres paling rasional dan paling potensial melalui simulasi pertanyaan top of mind pendapat responden jika ada cawapres perempuan di Pilpres 2024. Sebagai besar responden setuju, mendukung, dan mendorong munculnya kepemimpinan perempuan dalam kontestasi Pilpres 2024.

Survei juga menemukan beberapa argumen yang disampaikan responden, di antaranya adalah untuk membuka ruang politik yang progender, kehadiran perempuan di posisi strategis, pentingnya tokoh perempuan di posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan kaum perempuan.

Temuan survei Rumah Demokrasi menunjukkan sebanyak 55,6 persen responden merespon positif dan akan memilih cawapres perempuan. Kemudian, sebanyak 21 persen tidak memilih, sebanyak 7,2 persen ragu-ragu dan 15,9 persen tidak tahu/tidak menjawab.

Hasil survei Rumah Demokrasi menunjukkan elektabilitas Yenny Wahid sebesar 30,2 persen, kemudian disusul Khofifah Indar Parawansa 22,8 persen. Nama lain yang muncul adalah Susi Pudjiastuti 17,7 persen, Sri Mulyani 12,6 persen, dan Puan Maharani 8,7 persen. Sementara itu, sebanyak 8,1 persen responden belum menentukan pilihan.

Survei lainnya dilakukan Dialektika Institute di mana Yenny Wahid meraih elektabilitas tertinggi sebagai cawapres perempuan di basis NU menjelang Pilpres 2024 dengan elektabilitas 27,6 persen. Sementara, 25,4 persen memilih Khofifah Indar Parawansa.

Dalam survei itu, jika Prabowo dipasangkan dengan Yenny Wahid mendapat dukungan sebesar 40,7 persen. Sementara simulasi pasangan Ganjar Pranowo-Yenny Wahid memperoleh dukungan sebesar 32 persen.

• RDO

